

**KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF
PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN BUYA HAMKA
(ANALISIS KOMPARATIF HERMENEUTIK)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh:

**SOIMATUR ROHMAH
NIM. 20 17501032**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Soimatur Rohmah
NIM : 2017501032
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Kepemimpinan Politik Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka (Analisis Komparatif Hermeneutik)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari bukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Soimatur Rohmah
NIM. 2017501032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

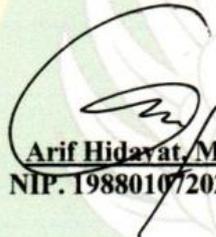
PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Kepemimpinan Politik Dalam Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka (Studi Komparatif Hermeneutik)

Yang disusun oleh Soimatur Rohmah (NIM 2017501032) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I


Arif Hidayat, M.Hum.
NIP. 19880107202311013

Penguji II

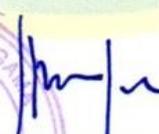

Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 198404202009122004

Ketua Sidang/Pembimbing


Dr. Mohammad Sobirin, S. Th.L., M.Hum.
NIP. 198711072020121006

Purwokerto, 20 Januari 2025

Dekan


Dr. Hartono, M.Si.
NIP. 197205012005011004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Soimatur Rohmah

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Soimatur Rohmah
NIM : 2017501032
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Kepemimpinan Politik Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka (Analisis Komparatif Hermeneutik)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. Mohammad Sobirin S.Th.I, M.Hum.
NIP. 198711072020121006

Kepemimpinan Politik Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka (Analisis Komparatif Hermeneutik)

Soimatur Rohmah

NIM 2017501032

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

Email: soimaturrohmah12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka tentang ayat-ayat kepemimpinan politik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masalah terkait kepemimpinan politik yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang memilih pemimpin hanya berdasarkan kekayaan yang dimiliki oleh kandidat pemimpin atau hanya mengikuti pilihan orang lain tanpa menelaah lebih dalam karakteristik yang dimiliki oleh kandidat pemimpin tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Hermeneutika Gadamer dan dibandingkan dengan menggunakan metode *muqarin*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian *library research* atau sering dikenal dengan studi kepustakaan. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir al-Azhar digunakan sebagai sumber primer (utama) dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *content analysis* yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari suatu teks dengan mengidentifikasi karakteristik teks tersebut. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu kepemimpinan politik yang baik menurut Sayyid Qutb dan Buya Hamka yaitu pemimpin yang berusaha menegakkan keadilan, amanah dan menjalankan musyawarah dengan baik. Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik menyebutkan bahwa Sayyid Qutb dan Buya Hamka sepakat bahwa seorang pemimpin harus adil, amanah, dan menjunjung tinggi musyawarah. Perbedaan penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terletak pada latar belakang sejarah yang melingkupinya. Sayyid Qutb yang merasakan penindasan dan ketidakadilan menyebabkan penafsirannya bersifat revolusioner dan reaktif terhadap situasi politik yang terjadi pada saat itu. Sedangkan penafsiran Buya Hamka lebih bersifat konstruktif karena Buya Hamka hidup pada masa awal kemerdekaan Indonesia sehingga lebih fokus untuk membentuk tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Meskipun memiliki perbedaan latar belakang kehidupan, Sayyid Qutb dan Buya Hamka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil dan mengutamakan rakyat.

Kata Kunci: Pemimpin, Politik, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Tafsir al-Azhar

Political Leadership from the Perspective of Sayyid Qutb and Buya Hamka (Comparative Hermeneutic Analysis)

Soimatur Rohmah

NIM 2017501032

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126

Email: soimaturrohmah12@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the interpretations of Sayyid Qutb and Buya Hamka regarding political leadership verses. The background of this research is based on issues related to political leadership that often occur in society. Many people choose leaders based on the wealth possessed by the candidates or simply follow the choices of others without deeply examining the characteristics of the candidates. The theory used in this research is Gadamer's Hermeneutic Theory, compared using the muqarin method. This type of research is library research, often referred to as a literature review. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an and Tafsir al-Azhar are used as primary sources in this study. The method used in this study is content analysis, which aims to draw conclusions from a text by identifying its characteristics. The results of the analysis show that the ideal political leadership according to Sayyid Qutb and Buya Hamka is a leader who strives to uphold justice, trustworthiness, and conducts consultation (musyawarah) well. The Hermeneutic analysis of Gadamer on the interpretations of Sayyid Qutb and Buya Hamka regarding verses about political leadership states that both Sayyid Qutb and Buya Hamka agree that a leader must be just, trustworthy, and uphold consultation. The difference in their interpretations lies in the historical context surrounding them. Sayyid Qutb, who experienced oppression and injustice, had a revolutionary and reactive interpretation towards the political situation at that time. On the other hand, Buya Hamka's interpretation was more constructive, as he lived during the early years of Indonesia's independence and focused more on establishing a just and prosperous society. Despite their differences in life backgrounds, Sayyid Qutb and Buya Hamka shared the same goal, which was to achieve a just leadership that prioritizes the people.

Keyword: *Leader, Politics, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Tafsir al-Azhar*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	h	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ َ َ ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ َ َ ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ...أُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: *ta' marbūtah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka itu *ta marbūtah* ditransliterasikan dengan ha (h).

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contohnya:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الرَّجُلُ *al-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *al-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

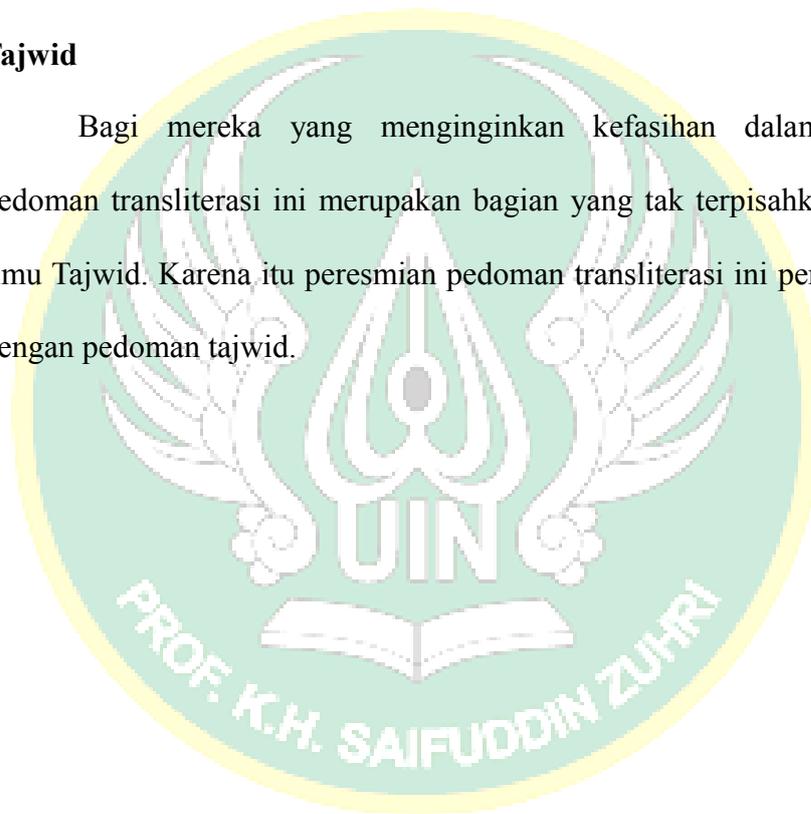
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contohnya:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*
- Naṣīr al-Dīn al-Tūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

Setiap individu merupakan seorang pemimpin. Begitu juga dengan diri sendiri yang bertanggung jawab memimpin masa depan dirinya sendiri maupun ruang lingkup yang mengitarinya.

Soimatur Rohmah



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat yang diberikan.

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang sangat sayangi, Bapak Wasimin dan Ibu Saodah

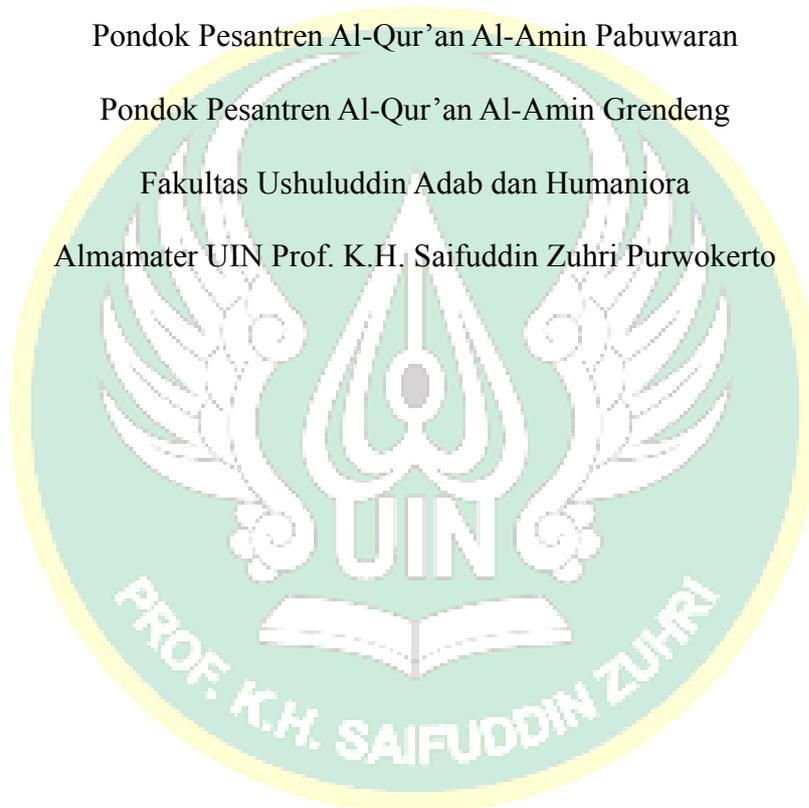
Kakak-kakak saya, Nur Salim, Umi Sulastri dan Titi Utari

Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran

Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Grendeng

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn. Puji syukur hanya pantas tercurah kehadirat Allah swt. Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kepemimpinan Politik Dalam Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka (Analisis Komparatif Hermeneutik).”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami. Namun berkat dukungan, bimbingan dan kerja sama dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Hartono, M. Si., selaku Dekan, Bapak Prof. Kholid Mawardi, S. Ag., M. Hum., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Farichatul Maftuchah M. Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Elya Munfarida, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Ibu Farah Nuril Izza, Lc., MA., Ph. D., selaku Ketua Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah.
4. Bapak A.M. Ismatullah, M. S.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

5. Bapak Dr. Mohammad Sobirin, S. Th. I., M. Hum, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah swt.
6. Segenap dosen dan karyawan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menimba ilmu di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang yang sangat peneliti sayangi Bapak Wasimin dan Ibu Saodah. Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis. Tanpa dukungan, motivasi dan doa-doa dari beliau tentu penulis tidak akan berada pada titik ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan dunia akhirat. Aamiin.
8. Kakak-kakak saya, Nur Salim, Titi Utari, dan terutama Umi Sulastri terimakasih telah mendukung dan mengantarkan penulis sampai titik ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah swt dimanapun berada.
9. Abah Mukti dan Ibu Permata Ulfah beserta keluarga ndalem Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran.
10. Gus Syafiq Muqoffi dan Ning Siti Machmiyah beserta keluarga ndalem Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Grendeng, beserta teman-teman, khususnya Kamar Qaff yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Grendeng, terutama Nida Aulia Mumtaz, Mega Yuliana Indah Lestari, Ulfi Shofi Hikmatin yang selalu penulis reportkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan penyusunan skripsi, Ulul Fatwa Zaharah yang senantiasa memberikan dukungan dan yang selalu penulis reportkan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 yang bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi sebagai langkah awal meraih kesuksesan.
14. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Terakhir, tentunya terimakasih kepada diri penulis sendiri karena telah semangat dan berjuang sepenuh hati sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga semua pihak yang terlibat senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah swt dan dimudahkan segala urusannya.

Purwokerto, 18 Desember 2024

Soimatur Rohmah
2017501032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Jenis dan Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Metode Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data	18
6. Sistematika Penulisan	19
BAB II BIOGRAFI SAYYID QUTB DAN BUYA HAMKA.....	21
A. Biografi Tokoh	21
1. Biografi Buya Hamka	21
2. Biografi Sayyid Qutb	28

BAB III ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER SECARA KOMPARATIF TERHADAP PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN BUYA HAMKA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK.....	35
A. Konsep Kepemimpinan Politik	35
1. Definisi Kepemimpinan Politik	35
2. Konsep Kepemimpinan Politik	36
B. Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Politik	37
C. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Politik.....	38
1. Penafsiran Q.S an-Nisa [04]: 58	38
2. Penafsiran Q.S an-Nisa [04]: 59	45
3. Penafsiran Q.S al-Ma'idah [05]: 51	55
4. Penafsiran Q.S ali-Imran [03]: 159.....	61
5. Penafsiran Q.S Sad [38]: 26.....	66
6. Penafsiran Q.S al-Mu'minin [23]: 8	71
7. Penafsiran Q. S al-Ma'arij [70]: 32	75
8. Penafsiran Q.S asy-Syura [42]: 38.....	77
D. Analisis Hermeneutika Gadamer Secara Komparatif.....	89
1. Teori Prasangka (<i>Vorurteil</i>).....	89
2. Teori Pengaruh Sejarah	93
3. <i>Fusion of Horizons</i> (Peleburan Horizon).....	96
4. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka tentang Kepemimpinan Politik Menggunakan Analisis Hermeneutika Gadamer	109
5. Kecenderungan Pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka Mengenai Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Politik	112
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik dan kepemimpinan merupakan persoalan yang rumit yang seringkali menimbulkan polemik dikalangan masyarakat umum. Selain manusia merupakan makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk berpolitik yang mana manusia itu sendiri memiliki keinginan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya keinginan tersebut membuat manusia membutuhkan adanya sosok pemimpin yang mampu mengatur kehidupan mereka untuk mencapai kehidupan yang rukun dan terhindar dari segala macam permusuhan dan pertikaian antar sesama (Qoharuddin, 2019).

Persoalan pemimpin dan kepemimpinan telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan seperti kriteria pemimpin yang baik agar kepemimpinan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada realitas kehidupan saat ini banyak masyarakat yang memilih pemimpin tidak berpegang pada ajaran al-Qur'an. Tidak sedikit masyarakat yang memilih pemimpin dengan bermodalkan keinginan hati dalam memilih atau hanya mengikuti pilihan orang lain tanpa mempertimbangkan kriteria seorang pemimpin yang baik yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Bahkan ada juga masyarakat yang memilih pemimpin dengan melihat banyak sedikitnya aset kekayaan yang dimiliki oleh kandidat pemimpin. Orang-orang yang seperti itu merupakan orang-orang yang belum memahami kriteria pemimpin yang baik yang telah dijelaskan di

dalam al-Qur'an. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu memahami kandungan al-Qur'an dengan baik karena terkendala dengan kadar keilmuan yang dimiliki.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak ahli ilmu yang berusaha untuk menciptakan suatu karya yang sekiranya dapat mempermudah masyarakat dalam memahami kandungan Al-Qur'an, contohnya yaitu Sayyid Qutb dan Buya Hamka. Beliau berdua merupakan tokoh mufassir Al-Qur'an yang telah menciptakan banyak karya yang dapat membantu masyarakat dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Salah satu karya dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka yaitu Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Azhar digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian ini. Kedua kitab tafsir tersebut memiliki corak penafsiran yang sama yaitu menggunakan corak *adabi ijtima'i*.

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karangan Sayyid Qutb merupakan salah satu kitab tafsir yang disebut-sebut memiliki terobosan baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Hal ini dapat ditinjau dari metodologi yang digunakan. Sayyid Qutb metodologi sendiri yang beliau gunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam penafsirannya, Sayyid Qutb memberi tawaran pembaharuan dan mengesampingkan pembahasan-pembahasan yang dianggap tidak terlalu penting. Salah satu aspek yang menonjol dari penafsiran Sayyid Qutb yaitu aspek sastra. Sayyid Qutb menggunakan segi sastra dalam penafsirannya untuk mengungkap segi hidayah Al-Qur'an serta pokok-pokok ajaran

khususnya kepada jiwa pembaca dan orang-orang Islam pada umumnya (Al-Khalidi, 2001 dalam Lestari & Vera, 2021).

Antony H. Jhons yang mengutip dari pendapat Issa Boullata menjelaskan bahwa Sayyid Qutb menggunakan pendekatan *tashwir* interpretatif dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pendekatan ini bertujuan untuk menampakkan pesan-pesan Al-Qur'an dalam wujud gambaran pesan yang nyata dan jelas yang dapat mengarahkan pembaca kepada pemahaman yang sesungguhnya. Penggunaan metode *tashwir* inilah yang menyebabkan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dikategorikan sebagai tafsir yang bercorak *Adabi al-Ijtima'I* (Ayyub, 1992 dalam Nandya Indayanti, n.d.).

Corak penafsiran yang sama juga digunakan oleh Buya Hamka dalam menulis kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Azhar. Kitab tafsir karya Buya Hamka ini lebih dominan menggunakan corak *adabi al-ijtima'I* dan *dakwah wal harakah*. Hal ini dapat dilihat dari penulisan kitab Tafsir Al-Azhar yang merujuk pada kaidah Bahasa Arab, Tafsir Salafi, Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, Ilmu Hadits, Ilmu Fiqh, dan bidang keilmuan lainnya. Selain itu, konteks penafsiran Buya Hamka juga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga proses dialektika tampak hidup karena mempertimbangkan dinamika sosial dan realitas masyarakat yang dijadikan sebagai konten dalam penafsirannya (Afrizal, 2021).

Peneliti menggunakan sejumlah ayat yang sesuai dengan tema penelitian ini yaitu tentang kepemimpinan politik yang nantinya dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Ayat-ayat tersebut diantaranya: Q.S

an-Nisa [04]: 58, Q.S an-Nisa [04]: 59, Q.S al-Ma'idah [05]: 51, Q.S Sad [38]: 26, Q.S al-Mu'minin [23]: 8, Q.S al-Ma'arij [70]: 32, Q.S ali-Imran [03]: 159, dan Q.S asy-Syura' [42]: 38. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang aspek-aspek yang hendaknya ditegakkan dalam pelaksanaan sistem kepemimpinan politik agar sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan Kemenag 2019

59. *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil lamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar, ayat tersebut menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin (*ulil amri*) merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang beriman. Kewajiban taat kepada pemimpin berada di urutan ketiga, yaitu setelah kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban taat kepada pemimpin sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah lah yang menjalankan tampuk kepemimpinan dengan bantuan para sahabat. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Rasulullah menjadi dua bagian yaitu urusan yang semata-mata berkaitan dengan agama dan urusan yang berkaitan dengan urusan umum. Dalam menjalankan urusan yang semata-mata berkaitan dengan urusan

agama, para sahabat dan masyarakat menunggu perintah dari Rasul sedangkan Rasul menunggu perintah langsung dari Allah. Sedangkan untuk urusan yang berkaitan dengan urusan umum, Rasulullah menyerahkan secara langsung kepada masyarakat dengan menjadikan *syura* (musyawarah) sebagai landasan dalam membuat keputusan. Jika masyarakat tidak sanggup untuk melakukan pertimbangan, maka urusan tersebut diserahkan kepada Rasulullah (*ulil amri*) yang kemudian keputusan yang dihasilkan wajib untuk ditaati oleh seluruh masyarakat (Hamka n.d.).

Adapun dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dijelaskan bahwa kedaulatan hukum yang sesungguhnya dimiliki oleh Allah swt. Allah memiliki hak *prerogatif uluhiyah*, salah satunya yaitu membuat syari'at. Allah membuat syari'at untuk seluruh manusia yang kemudian ditulis dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan syari'at tersebut kepada umatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan juga memiliki kewajiban untuk taat kepada Rasul karena tugas yang diemban oleh Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah karena Allah yang telah memberikan tugas kepada Rasul yaitu mengemban risalah yang kemudian bertugas juga untuk menyampaikannya kepada manusia. Sedangkan taat kepada *ulil amri* merupakan wujud pengembangan dari perintah taat kepada Allah dan Rasul. *Ulil amri* yang sudah terpilih dari kalangan masyarakat itu sendiri memiliki hak untuk ditaati segala perintah dan kebijakannya oleh masyarakat selama *ulil amri* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam (Qutb, 2001).

Meninjau dari corak penafsiran yang digunakan oleh masing-masing kitab tafsir, kedua kitab tafsir tersebut seringkali disebut sebagai tafsir yang mirip. Hal ini disebabkan karena penggunaan corak penafsiran yang sama serta penulis dari kitab tersebut memiliki latar belakang kehidupan yang sama. Sayyid Qutb dan Buya Hamka merupakan seorang sastrawan yang juga terjun dalam dunia politik. Sayyid Qutb dan Buya Hamka adalah sosok yang kritis terhadap pemerintah sehingga akibat dari kekritisannya itu beliau dipenjara dan mendapatkan ketidakadilan oleh pihak pemimpin politik yang berkuasa pada masa itu. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka yang berkaitan dengan kepemimpinan politik. Meskipun sering disebut sebagai tafsir yang mirip dan berasal dari latar belakang kehidupan yang hampir sama tentu saja tetap terdapat perbedaan pandangan antara Sayyid Qutb dan Buya Hamka. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Kepemimpinan Politik Perspektif Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka (Analisis Komparatif Hermeneutik)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik perspektif Sayyid Qutb dan Buya Hamka?
2. Bagaimana analisis komparatif dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Gadamer terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik perspektif Sayyid Qutb dan Buya Hamka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Gadamer pada penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait konsep kepemimpinan politik dalam al-Qur'an bagi siapa saja yang membacanya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang konsep-konsep kepemimpinan politik dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin politik yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kajian Terdahulu

Pertama. Skripsi Muhammad Yahya Rohmatullah dengan judul “Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)”. Pada penelitian ini membahas tentang konsep kepemimpinan dalam al-Qur’an berdasarkan pemikiran dari Buya Hamka melalui elaborasi terhadap penafsirannya pada term *khalifah*.

Hasil dari penelitian ini yaitu penafsiran Hamka terhadap kata *khalifah* lebih cenderung sebagai pengganti atau penyambung. Kata pengganti itu sendiri dapat dinisbatkan kepada dua hal utama, yang pertama manusia sebagai Allah. Manusia sebagai pengganti Allah bukan berarti manusia memiliki kekuasaan yang sama sebagaimana Allah berkuasa di muka bumi. Yang kedua yaitu manusia sebagai pengganti umat terdahulu yang sudah dimusnahkan. Sedangkan pada kata *imam*, Hamka lebih cenderung mengartikannya sebagai pemimpin moral dan kata *ulil amri* dimaknai sebagai orang yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan. Pemikiran Hamka ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, *ulil amri* di zaman modern ini tidak hanya terpaku pada ulama agama tetapi mencakup siapa saja yang berkompeten dalam bidang apa saja dan mampu diajak bermusyawarah.

Kedua. Tesis karya Muhammad Amin yang berjudul “Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Pandangan Sa’id Hawwa dalam *Al-Asas fi al-Tafsir* dan Triloginya)”. Skripsi ini membahas tentang

pemimpin dan bentuk kepemimpinan berdasarkan pemikiran dari Sa'id Hawwa.

Hasil penelitian ini yaitu mengutarakan pendapat Sa'id Hawwa bahwa bentuk kepemimpinannya yang pas bagi umat Islam adalah kekhilafahan dan dalam terminologi Sa'id Hawwa bahwa kepemimpinan yang tertinggi dalam Islam disebut dengan *al-khilafah al-'uzma* dan yang memegang kepemimpinan tersebut disebut dengan *al-imam al-a'zam*.

Ketiga. Skripsi karya Faris Nurhabib dengan judul "Konsep Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an". Penelitian ini membahas tentang term pemimpin yang terdapat di dalam al-Qur'an, syarat-syarat seseorang menjadi pemimpin yang sesuai dengan al-Qur'an.

Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama membahas tentang istilah-istilah pemimpin yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya khalifah, imam atau imamah, *ulil amri*, wali dan malik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun syarat yang paling utama bagi seorang pemimpin adalah beragama Islam. Selanjutnya ada syarat-syarat lain untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya yaitu seorang laki-laki, adil, amanah, tanggung jawab, baligh, merdeka dalam artian bukan seorang budak atau hamba sahaya, memiliki keilmuan yang mumpuni, dan memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

Keempat. Skripsi karya Muhammad Habibie yang berjudul "Konsep Kepemimpinan Menurut Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Al-

Mishbah”. Penelitian ini membahas tentang pandangan Sayyid Qutb dan Prof. Dr. Quraish Shihab terkait dengan kepemimpinan.

Hasil penelitian ini yaitu penelitian ini mengutarakan dua pendapat mufassir Sayyid Qutb dan Quraish Shihab terkait orang yang lebih berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Hal ini dilihat dari kekhususan dan kodrat masing-masing, karena menjadi pemimpin merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Dua mufassir tersebut juga bersepakat bahwa yang hendaknya dijadikan sebagai pemimpin orang beriman adalah dari golongan orang yang beriman juga. Hal ini dikarenakan pemimpin merupakan salah satu penghubung antara manusia dengan Allah yang mana pemimpin ikut serta mengatur urusan yang ada. Terdapat perbedaan pemikiran antara Sayyid Qutb dan Quraish Shihab yaitu pada sikap dan pandangan terhadap pengikut pemimpin non Islam (kafir) serta kepemimpinan wanita yang seringkali dianggap beban tambahan.

Kelima, Tesis karya Aidil Azhari Handayani yang berjudul “Konsep Pemikiran Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip kekuasaan politik sesuai dengan yang tercantum di dalam Al-Qur’an.

Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang konsep politik yang diajarkan oleh Al-Qur’an, seperti pemimpin haruslah orang yang beriman sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah al-Ma’idah ayat 57, perintah taat kepada pemimpin sebagaimana yang dijelaskan dalam surat

an-Nisa ayat 59, menjelaskan karakter atau sifat manusia yang berhak atau layak menjadi seorang pemimpin dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58-59, perintah untuk memutuskan suatu masalah dengan jalan musyawarah seperti yang dijelaskan dalam surat asy-Sura ayat 38. Selain itu, tesis ini juga mencantumkan kisah-kisah kepemimpinan kaum-kaum terdahulu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an baik itu kisah pemimpin yang baik dan bertanggung jawab maupun pemimpin yang dzalim seperti kepemimpinan Fir'aun terhadap kaumnya.

2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema serupa dengan judul skripsi ini. Banyak penelitian yang membahas tentang kepemimpinan, baik itu dari segi sifat, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ataupun aspek-aspek kepemimpinan lainnya yang dilihat dari pemikiran-pemikiran tokoh politik ataupun dari kitab tafsir Al-Qur'an secara langsung. Sementara itu, penelitian ini akan membahas tentang aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka. Setelah hasil penafsiran dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka dipahami dengan baik, kemudian hasil pemahaman dari kedua tafsir tersebut dikomparasikan atau dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua pemikiran tokoh tersebut.

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori Hermeneutika Gadamer untuk dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis persamaan, perbedaan dan perbandingan terhadap hasil penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka mengenai ayat-ayat tentang Kepemimpinan Politik. Dalam teori Hermeneutika Gadamer, dijelaskan bahwa pemahaman terhadap teks baik itu teks suci maupun non-suci tidak boleh dipahami secara obyektif dan tidak juga subyektif. Hal ini dikarenakan pemikiran dari penafsir dilatar belakangi oleh unsur kebudayaan yang mengelilinginya (Mudin, Fikri, and Shobirin 2021).

Peneliti memilih menggunakan Teori Hermeneutika Gadamer dalam penelitian ini dikarenakan Teori Hermeneutika Gadamer menawarkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu teks tidak hanya sebatas makna yang sederhana. Selain itu, pemahaman teks dengan menggunakan Hermeneutika Gadamer juga melibatkan antara aspek sejarah, budaya serta peran pembaca dalam memahami teks sehingga diperoleh makna yang komprehensif.

Berikut ini teori pokok dalam memahami teks dengan menggunakan teori Hermeneutika Gadamer:

a. Prasangka (*Vorurteil*)

Pada langkah ini, Gadamer mengawalinya dengan penjelasan teori pra-struktur memahami yang merupakan bagian dari pemahaman Hermeneutik Heidegger. Gadamer setuju dengan konsep pra-struktur

memahami yang dikembangkan oleh gurunya yaitu Heidegger. Bahkan Gadamer menggunakan konsep pra-struktur memahami untuk melakukan pemulihan (rehabilitasi) terhadap konsep prasangka. Cara yang ditawarkan oleh Heidegger untuk menginterpretasikan dengan konteks dari sebuah proyeksi yaitu:

1) *Vorsicht* (kewaspadaan, melihat lebih dulu)

Maksud dari *vorsicht* yaitu dalam melihat makna sebuah teks kita bersandar pada makna yang sudah dimiliki untuk masa depan dan tidak kembali kepada makna masa lalu dari teks tersebut.

2) *Vorhabe* (rencana, lebih dahulu)

Maksudnya yaitu penafsir telah memiliki pemahaman umum terlebih dahulu baik itu dari segi konsep, ide maupun yang lainnya yang nantinya akan membantu sebagai proyeksi untuk masa depan.

3) *Vorgriff* (antisipasi, menangkap lebih dulu)

Maksudnya yaitu seorang penafsir telah memiliki pemahaman terhadap makna teks yang akan disampaikan agar selaras dengan dirinya dan juga zamannya. Berdasarkan hal ini, interpretasi diartikan sebagai mengungkap makna untuk masa depan dari seseorang yang berusaha memahami teks dengan dasar pra-pemahaman bukan untuk mencari objektivitas. Pembaca tidak dituntut untuk memahami makna teks dari masa lalunya, melainkan dituntut untuk menggunakan pra-pemahaman yang dimilikinya untuk menghasilkan makna baru yang selaras untuk dirinya sendiri dan juga masa depannya.

b. Pengaruh Sejarah

Pada hakikatnya, pemahaman merupakan sebuah ikatan sejarah yang efektif. Seorang penafsir atau pembaca harus sadar bahwa untuk mencapai pada sebuah pemahaman terhadap teks atau fenomena sejarah terdapat pengaruh dari sejarah yang selalu mengelilinginya baik itu dari segi politik, tradisi, pengalaman dan lain sebagainya. Akibat dari kesadaran akan keterpengaruhan sejarah dalam proses pemahaman teks yaitu terbebas dari pemahaman teks secara obyektif (Mudin et al. 2021).

c. Penggabungan Horizon (*Fusion of Horizons*)

Aspek selanjutnya dalam menganalisis teks dengan menggunakan teori Hermeneutika Gadamer yaitu peleburan horizon teks. Gadamer menyebutkan bahwa proses pemahaman dan penafsiran memiliki dua horizon utama yang harus diasimiliasi atau dileburkan yaitu horizon teks dan horizon pembaca. Dalam proses peleburan dua horizon ini memperhatikan aspek historis teks (Hanif, 2017). Tujuan dari peleburan dua horizon ini yaitu agar teks masa lalu dan teks yang baru (hadir belakangan) dapat terus berkembang, memiliki nilai serta tidak stagnan.

d. Penerapan (Interpretasi)

Gadamer menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur yang selalu berkaitan dalam proses pemahaman teks, yaitu pemahaman, penafsiran dan penerapan atau pengaplikasian. Seorang penafsir tidak hanya dituntut untuk memperoleh pemahaman dari horizon yang melingkupi teks masa lalu, melainkan dituntut juga untuk mampu melakukan penerapan. Hal ini

dikarenakan penerapan merupakan tahapan akhir dari Hermeneutika Gadamer dan proses penerapan adalah satu kesatuan dari pemahaman yang tidak dapat dipisahkan dari metode pemahaman (Mudin et al. 2021).

G. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* atau studi pustaka. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel atau lainnya yang memiliki tema sama.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan terhadap suatu fenomena dan lebih berfokus pada substansi makna. Pada penelitian kualitatif ini tidak nampak penggunaan alat-alat statistik. Kekuatan kata serta kalimat yang digunakan dalam proses analisis dan penyimpulan data sangat berpengaruh dalam penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus yang terkandung di dalam suatu pesan baik itu berupa buku, majalah, informasi yang tertulis dalam suatu teks maupun objek lain yang terdokumentasikan (Rahman, 2022).

3. Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber primer atau sumber utama adalah kitab tafsir karya Sayyid Qutb dan Buya Hamka atau karya-karya beliau yang lain yang berkaitan dengan kepemimpinan politik.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu bukum jurnal, artikel dan sebagainya yang memiliki tema sama dengan penelitian ini yaitu tentang kepemimpinan politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa kata kunci kemudian melakukan pencarian ayat-ayat pada Kitab *al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadz Al-Qur'an al-Karim* tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik. Kata kunci yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Kata Kunci	Jumlah Pengulangan Dalam Al-Qur'an
اولى الامر	2 kali
خليفة	127 kali

اولياء	82 kali
امام \ امامة	12 kali
عدل	13 kali
الامانات	5 kali
شورى \ شاور	2 kali

Setelah melakukan pencarian ayat menggunakan kata kunci diatas, ditemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik, yaitu Q.S an-Nisa [04]: 58, Q.S an-Nisa [04]: 59, Q.S al-Ma'idah [05]: 51, Q.S Sad [38]: 26, Q.S al-Mu'minin [23]: 8, Q.S al-Ma'arij [70]: 32, Q.S ali-Imran [03]: 159, dan Q.S asy-Syura' [42]: 38.

Penggunaan kata kunci dalam pencarian ayat-ayat seputar kepemimpinan didasarkan pada kategori ayat-ayat tentang kepemimpinan tersebut. Di dalam al-Qur'an terdapat dua kategori kepemimpinan, yaitu kepemimpinan privat seperti kepemimpinan keluarga dan juga kepemimpinan publik yaitu kepemimpinan politik. Banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang kepemimpinan politik yang berdasarkan dengan ayat-ayat yang telah dikumpulkan oleh penulis dan kata kunci yang digunakan dalam pembahasan kepemimpinan politik seperti kata kunci yang telah dicantumkan di atas. Selain itu, kata kunci yang telah disebutkan diatas merupakan kata kunci yang berhubungan dengan kepemimpinan politik yaitu terkait dengan pemimpin dan sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin.

Setelah mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik, kemudian ayat-ayat tersebut dianalisis menggunakan metode komparatif (perbandingan) dengan pendekatan Hermeneutika Gadamer.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *muqarin* (perbandingan). Peneliti membandingkan hasil penafsiran dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka mengenai Kepemimpinan Politik. Dalam melakukan analisis perbandingan ini peneliti menggunakan teori Hermeneutika Gadamer sebagai pendekatan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses analisis ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema penelitian.
- b. Mengumpulkan sumber data-data yang selaras dengan tema penelitian.
- c. Mengumpulkan data-data yang mengandung penjelasan tentang pemikiran dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka.
- d. Menjabarkan data-data yang telah terkumpul dalam bentuk tulisan.

Setelah semua data-datanya terkumpul, langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis dan memaparkan secara deskriptif dan tersusun yang dimulai dari biografi tokoh, sejarah penulisan kitab tafsir, penjabaran

ayat-ayat tentang kepemimpinan politik, dan penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik. Setelah itu melakukan analisis komparatif (perbandingan) dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Gadamer terhadap data-data tersebut dan menggabungkan data-data tersebut agar diperoleh penafsiran baru atau kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian dalam skripsi terdiri dari beberapa bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulisan akan membaginya menjadi empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan. Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode dan jenis penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan ini menjelaskan tentang biografi serta latar belakang pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka, dan sekilas penjelasan tentang Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir al-Azhar.

Bab ketiga. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kepemimpinan politik, menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik, menjabarkan penafsiran dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka, menganalisis hasil penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka menggunakan metode komparatif dengan menggunakan pendekatan

Hermeneutika Gadamer. Setelah itu, kemudian dijelaskan persamaan dan perbedaan serta perbandingan dari pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka tentang Kepemimpinan Politik.

Bab keempat. Bab keempat ini merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan, kritik dan saran terkait penulisan hasil penelitian.



BAB II

BIOGRAFI SAYYID QUTB DAN BUYA HAMKA

Sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih mendalam alangkah lebih baik untuk mengetahui biografi dan latar belakang kehidupan dari tokoh penulis kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini. Mengetahui biografi dan latar belakang kehidupan dari penulis kitab tafsir merupakan hal yang penting dikarenakan seorang pembaca perlu mengetahui apa saja yang melatarbelakangi pemikiran penulis kitab tafsir dan kepada siapa saja beliau berguru sehingga menghasilkan pemikiran yang sedemikian rupa. Selain itu, mengkaji biografi Sayyid Qutb dan Buya Hamka juga dapat dijadikan sebagai kisah inspiratif bagaimana kegigihan beliau dalam menimba ilmu dan memperjuangkan kemaslahatan bersama. Berikut ini biografi Sayyid Qutb dan Buya Hamka sebagai penulis kitab tafsir yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini:

A. Biografi Tokoh

1. Biografi Buya Hamka
 - a. Riwayat Hidup Buya Hamka

Buya Hamka atau yang memiliki nama lengkap H. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah dilahirkan di Tanah Sirah, Desa Sungai Batang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M atau pada tanggal 14 Muharram 1326 H dan wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Gelar Buya yang dimiliki oleh Hamka merupakan panggilan khas bagi ulama

Minangkabau. Kata *abuya* merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata *abi* yang bermakna ayahku atau seseorang yang dihormati.

Ayah Hamka yang bernama Dr. Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan julukan haji Rasul merupakan keturunan dari seorang pahlawan paderi yang bernama Abdul Arif yang memiliki gelar Tuanku Pauh Pariaman nan Tuo. Abdul Arif juga dikenan dengan julukan Haji Abdul Ahmad. Ayah Hamka, Dr. Karim Amrullah merupakan seorang ulama yang terkenal yang menjadi bagian dari tiga serangkai yang menjadi pelopor dari gerakan “kaum muda” di Minangkabau yaitu Syaikh Muhammad Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad, dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Afrizal, 2021). Ayah Hamka juga merupakan tokoh pembaharu di Minangkabau setelah kembali dari Makkah yaitu pada tahun 1906. Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo dan beliau wafat pada tahun 1934.

Semasa kecil, Buya Hamka memulai pendidikannya di rumah orang tuanya sendiri. Hamka belajar Al-Qur'an sampai khatam dan kemudian pindah ke Padang Panjang. Pada saat itu Padang Panjang merupakan kota yang menjadi basis pergerakan kaum muda Minangkabau. Setelah Hamka berusia 7 tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa sebagaimana anak-anak lainnya pada saat itu. Kemudian pada tahun 1916 Hamka mengikuti sekolah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai el Yanusi. Sehingga mulai saat itu aktifitas keseharian Hamka setiap pagi belajar di sekolah desa, kemudian pada

sore hari belajar di sekolah diniyah dan pada malam hari belajar mengaji (Alviyah, 2017).

Pelaksanaan pendidikan pada saat itu masih berjalan dengan cara yang tradisional. Materi yang diajarkan pada saat itu masih seputar kitab-kitab klasik, misalnya nahwu, shorof, bayan, fiqih, mantiq, dan kitab-kitab lainnya. Keseluruhan leilmuan tersebut dipelajari dengan sistem hafalan. Meskipun Hamka tidak merasa puas dengan sistem belajar yang seperti itu, Hamka tetap mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya (Al-Fathoni, 2015). Pada usia 10 tahun, tepatnya pada tahun 1918 Hamka berhenti bersekolah di sekolah dan pindah ke Thawalib School. Orang tua Hamka berharap dengan bersekolah di Thawalib School Hamka dapat menjadi seorang ulama sama seperti orang tuanya (Afrizal, 2021).

Sistem pembelajaran yang diterapkan di Thawalib School adalah sistem klasikal. Akan tetapi sistem kurikulum dan materi yang diteraokan menggunakan merode lama yaitu keharusan menghafal menjadi ciri khas utama dari sekolah tersebut. Metode belajar yang seperti ini membuat Hamka merasa bosan sehingga setelah belajar selama 4 tahun yaitu ketika berada di kelas empat Hamka tidak tertarik untuk menyelesaikan sekolahnya. Padahal sekolah yang didirikan oleh ayahnya ini dirancang untuk proses pemdidikan selama tujuh tahun.

Menurut Hamka, sistem pembelajaran yang diterapkan di Thawalib School tidak menarik, hal ini dikarenakan keseriusan dalam

belajar tidak tumbuh dari dalam melainkan adanya paksaan dari luar. Hamka memiliki sikap yang kritis dan juga jiwa pemberontak sehingga Hamka memilih untuk melarikan diri dan lebih memilih untuk memfokuskan dirinya di sebuah perpustakaan Zainaro yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yanusi dan Bagindo Sinaro. Pelarian Hamka merupakan hal yang baik dikarenakan dengan memfokuskan dirinya di sebuah perpustakaan memiliki banyak pengaruh terhadap perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak. Selain itu, pelarian Hamka di sebuah perpustakaan juga dapat menambah kemampuan bercerita dan menulis di masa yang akan datang (Alviyah, 2017).

Selain belajar di madrasah yang didirikan oleh ayahnya, Hamka juga beberapa kali mengikuti kajian agama di surau-surau dan masjid yang disampaikan oleh ulama-ulama yang terkenal pada masa itu. Hamka muda terkenal sebagai pengelana, bahkan Hamka juga diberi gelar Si Bujang Jauh oleh ayahnya (Al-Fathoni, 2015). Setelah usia Hamka mencapai usia 16 tahun, Hamka rihlah ke Jawa tepatnya ke Kota Yogyakarta dan Kota Pekalongan. Di kota tersebut Hamka belajar kepada tokoh Islam yang masyhur yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Dengan Ki Bagus Hadikusumo Hamka belajar tafsir dengan metode yang baru, yaitu untuk memahami maksud kandungan al-Qur'an. Ketika di Padang Panjang Hamka juga pernah membaca tafsir hanya saja dengan menggunakan pendekatan nahwu shorof. Selain berguru kepada Ki Bagus Hadikusumo, di tanah Jawa Hamka juga berguru

kepada ketua Syarikat Islam yaitu HOS Cokroaminoto, RM Suryopranoto, dan salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Fachruddin. Denag berguru kepada tiga tokoh tersebut Hamka memperoleh nilai-nilai kehidupan yang berbeda-beda (Afrizal, 2021).

Buya Hamka memulai kegiatan kerjanya sebagai seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi pada usia 29 tahun. Kemudian mulai tahun 1957 sampai tahun 1958 Hamka melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Setelah menjabat sebagai dosen, kemudian Hamka diangkat sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Selain menjabat sebagai rektor, Hamka juga menjadi seorang guru besar di Universitas Mustopo Jakarta (Alviyah, 2017).

Selain menjadi dewan pengajar, Hamka juga memiliki jabatan sebagai pegawai tinggi agama. Hamka diangkat menjadi pegawai tinggi agama pada tahun 1951 oleh Menteri Agama Indonesia dan Hamka menjabat sampai tahun 1960. Selama menjabat, Hamka meletakkan jabatannya setelah diberikan dua pilihan oleh Soekarno, yaitu untuk tetap mengemban jabatan sebagai petinggi negara atau melanjutkan kegiatan politiknya diorganisasi Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi). Hamka sendiri lebih memilih untuk melakukan penelitian terhadap berbagai bidang keilmuan, seperti filsafat, sejarah, sastra, sosiologi serta bidang politik baik itu politik yang terdapat dalam Islam maupun politik Barat. Berbekal dengan kemahiran yang

dimilikinya di bidang bahasa yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, Hamka meneliti karya-karya ulama Timur Tengah dan karya-karya para sarjana Barat (Alviyah, 2017).

b. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka ini berawal dari ceramah atau kuliah subuh yang dilakukan oleh Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Kajian tafsir yang dilakukan oleh Hamka dimulai dari juz 15 tepatnya dimulai dari Surah al-Kahfi (Muhlis and Sholeh, 2019). Penjelasan Hamka yang dilakukan setiap subuh mengenai tafsir al-Qur'an secara teratur dipublikasikan dalam majalah *Gema Islami* yang pada saat itu berada dibawah naungan Jenderal Soedirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Catatan hasil ceramah dari Hamka yang ditulis mulai tahun 1959 pertama kali dipublikasikan oleh majalah *Gema Islami* pada tanggal 15 Januari 1962. Majalah *Gema Islami* ini merupakan pengganti dari Majalah Panji Masyarakat yang pada saat itu dihentikan oleh Soekarno (Hidayati, 2018).

Pada Hari Senin tanggal 27 Januari 1964 yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru, Hamka ditangkap dan dikurung dalam penjara selama 2 tahun 7 bulan. Hamka dituduh melakukan penghiatan atas negara sendiri. Selama di penjara, Hamka menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan tafsirnya (Fattah and Khasanah, 2021). Tafsir al-Azhar pertama kali diterbitkan pada tahun

1967 (Muhlis and Sholeh, 2019). Penamaan Tafsir Al-Azhar didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya yaitu tafsir ini bermula dari sebuah kajian yang dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Adapun alasan yang kedua yaitu sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan wujud penghargaan kepada Al-Azhar Mesir yang telah memberinya gelar Ustdziyah Fakhriyah (Doctor Honoris Causa) (Hidayati, 2018).

Tafsir al-Azhar berisi penjelasan tentang background kehidupan penafsir. Selain itu, tafsir ini juga memberikan penjelasan terkait watak dan kondisi sosial-budaya masyarakat pada saat itu (Muhlis and Sholeh, 2019). Di dalam Tafsir Al-Azhar juga dijelaskan makna setiap ayat dalam al-Qur'an secara mendalam, menguraikan arti dalam al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik, serta menghubungkan ayat-ayat yang tersebut dengan realitas sosial masyarakat yang ada. Berbagai perspektif dan manhaj mengenai kaidah-kaidah dalam Bahasa Arab serta tafsir-tafsir ulama klasik, ilmu hadits, ilmu fiqh, asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan keilmuan lainnya digunakan oleh Hamka dalam proses penulisan tafsirnya. Selain itu, Hamka juga menggunakan ijtihad dalam membandingkan mazhab (Fattah and Khasanah, 2021).

2. Biografi Sayyid Qutb

a. Riwayat Hidup Sayyid Qutb

Sayyid Qutb atau yang memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili lahir di desa Qaha, Provinsi Asyuth pada tanggal 09 Oktober 1906. Ayah Sayyid Qutb bernama al-Hajj Qutb bin Ibrahim, seorang petani terhormat yang tergolong sukses serta merupakan tokoh nasionalis (Muhajirin, 2017). Ibu Sayyid Qutb bernama Fatimah Husain Utsman (Subki, Sugiarto, and Janhari, 2021). Ibu Sayyid Qutb berasal dari keluarga yang religius dan terhormat serta berasal dari keluarga berpendidikan tinggi dan kaya. Ibu Sayyid Qutb memiliki empat saudara yang mana salah satu dari saudara ibunya tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan Sayyid Qutb. Hal ini dikarenakan Sayyid Qutb pernah hidup bersama ketika berada di Kairo (Wulandari, Rostandi, and Kosasih, 2017).

Sejak kecil Sayyid Qutb sudah terbiasa mendengar dan membaca al-Qur'an meskipun belum sepenuhnya mampu memahami maksud dan tujuan dari al-Qur'an. Sayyid Qutb mengakui bahwa dia menemukan sesuatu yang menarik dalam al-Qur'an. Sejak masa kanak-kanak dan remaja, Sayyid Qutb sudah mulai menunjukkan kecerdasan serta bakat-bakat yang dimilikinya. Sayyid Qutb berhasil menarik perhatian guru dengan keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat-pendapat cerdasnya, mampu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki (Subki et al. 2021).

Sayyid Qutb menempuh pendidikan dasar didaerahnya sendiri selama empat tahun dan pada saat Qutb menginjak usia sepuluh tahun dia berhasil menghafal al-Qur'an. Pengetahuan dan keilmuan yang terutama dalam bidang pendidikan agama yang dimiliki oleh Sayyid Qutb memiliki pengaruh yang dominan dalam kehidupan Sayyid Qutb (Winata, 2021). Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua Sayyid Qutb mulai menyadari bakat yang dimilikinya. Sayyid Qutb dipindahkan ke Halwan, daerah pinggiran Cairo. Sayyid Qutb berkesempatan untuk menempuh pendidikan di Tajhiyah Daar al-'Ulum. Selanjutnya, pada tahun 1929 Sayyid Qutb melanjutkan kuliah di Daar al-'Ulum dan meraih gelar sarjana muda dalam bidang pendidikan (Muhajirin, 2017).

Pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqqad yang mengadopsi pendekatan westernisasi banyak mempengaruhi pemikiran Sayyid Qutb semasa kuliah. Sayyid Qutb sangat tertarik dengan sastra inggris sehingga dia banyak mempelajarinya dalam bentuk terjemahan (Winata, 2021). Setelah lulus, Sayyid Qutb kemudian diangkat menjadi inspektur di departemen pendidikan, akan tetapi pada akhirnya jabatan tersebut ditinggalkan dan lebih memilih untuk fokus pada bidang kepenulisan (Muhajirin, 2017).

Sayyid Qutb telah terlibat dalam kegiatan sastra, politik, dan intelektual sejak ia masih menempuh studi di Daar al-'Ulum. Sayyid Qutb juga berani menyampaikan ceramah-ceramahnya yang kritis di

mimbar fakultas, Disamping itu, Sayyid Qutb beserta rekan-rekan seperjuangannya menulis banyak puisi dan esai di berbagai majalah dan surat kabar (Asmita, 2022).

Sejak menyelesaikan kuliahnya sampai pada tahun 1951, Sayyid Qutb menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, karya tulis yang dihasilkannya tidak dipenuhi dengan kerusakan moral sebagaimana kebanyakan penulis pada saat itu dan pada akhirnya karya-karya yang dihasilkan lebih condong kepada Islam (Kurniawan, 2017). Kehidupan Sayyid Qutb mengalami perkembangan dari segi pemikiran, yang awalnya merupakan seorang penulis muda kemudian berubah menjadi orang yang fanatik terhadap Islam setelah kembali dari studinya di Amerika (Winata, 2021).

Setelah menempuh masa studi di Amerika, Sayyid Qutb mulai memahami masalah sosial yang disebabkan oleh paham materialisme yang menyimpang dari asas ketuhanan. Setelah kembali ke Mesir, Sayyid Qutb semakin merasa yakin bahwa hanya agama Islam yang dapat membebaskan manusia dari paham materialisme, sehingga dapat membebaskannya dari cengkeraman materialisme yang tidak pernah puas (Kurniawan, 2017).

Ketika sudah kembali ke Mesir, Sayyid Qutb kemudian bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh bersama Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir

Audah. Ketika larangan terhadap ikhwanul muslimin dicabut yaitu pada tahun 1951, Sayyid Qutb terpilih menjadi anggota komite eksekutif dan memimpin divisi hubungan. Pada tahun 1953, ia berpartisipasi dalam sebuah konferensi di Suriah dan Yordania, dan seringkali berbicara tentang pentingnya moralitas dalam kebangkitan komunitas. Pada bulan Juli 1954, Sayyid Qutb memimpin tim editorial harian Ikhwanul Muslimin. Namun, dua bulan kemudian surat kabar tersebut ditutup atas perintah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, karena dianggap mengancam perjanjian antara Mesir dan Inggris pada Juli 1954 (Muhajirin, 2017).

Pemerintahan yang dipimpin oleh Nasser menangkap Sayyid Qutb dan beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin pada bulan Mei 1955 dengan tuduhan terlibat pada konspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa pada Juli 1955. Sayyid Qutb dipenjara di Mesir selama sekitar 10 tahun, yaitu hingga tahun 1964. Setelah dibebaskan oleh Presiden Irak yang saat itu menjabat, yaitu Abdus Salam Arif yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan resmi ke Mesir, Sayyid Qutb ditangkap lagi dan dipenjara selama 1 tahun karena tuduhan bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin terlibat dalam konspirasi untuk membunuh Presiden Nasser. Di Mesir, Undang-Undang No. 911 tahun 1966 memberikan wewenang kepada presiden untuk merebut kekuasaan dan menahan tanpa proses hukum bagi siapapun yang dianggap bersalah.

Mungkin dari pengalaman buruk ini dan perasaan telah dirugikan membuat Sayyid Qutb sangat peka terhadap sistem pemerintahan. Selama hukumannya, Sayyid Qutb menyelesaikan tafsirnya yang disebut dengan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an (Humaira and Astuti, 2017).

Sayyid Qutb dan kedua temannya yang bernama Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy meninggal dunia pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 H/ 29 Agustus 1966 M dan menjadi syahid di tali tiang gantungan (Qutb, 2001). Sayyid Qutb dan kedua temannya itu dituduh bersalah oleh “Mahkamah Militer” (Siregar 2017). Sayyid Qutb dan kedua temannya dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan berencana untuk membunuh Presiden Gamal Abdul Nasher (Lestari and Vera, 2021).

b. Sejarah Penulisan Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*

Kepenulisan Sayyid Qutb dimulai dari tahun 1951 hingga 1964 yang kemudian beliau beralih ke kepenulisan Islam yang serius dan cemerlang. Tahun-tahun ini juga merupakan tahun yang produktif dimana banyak muncul karya-karya besar yang nantinya akan menjadi warisan Islam dimasa kini dan masa yang akan datang. Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* merupakan salah satu karya yang menjadi warisan intelektual dari Sayyid Qutb. Kitab tafsr ini ditulis selama hampir 8 tahun dan juz 1 merupakan hasil penafsirannya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 (ABD. RASYID, 2022).

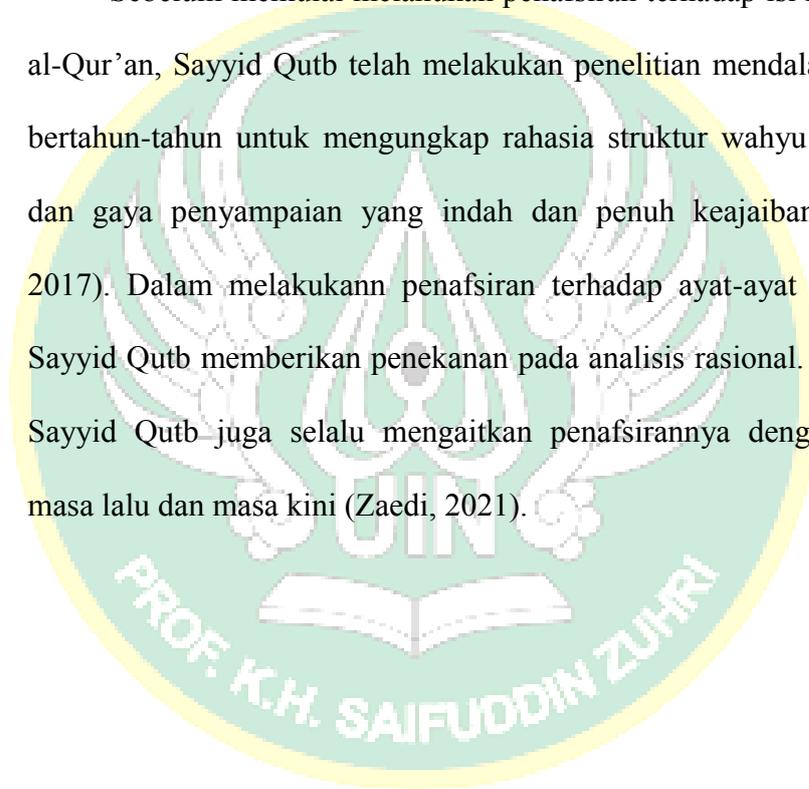
Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* didasarkan pada penelitian mendalam yang telah dilakukan yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah, serta dari buku-buku tafsir yang *mu'tabar*. Setelah mengumpulkan pengalaman yang luas dan melakukan penelitian di bidang penulisan, pengajaran, pendidikan, serta pengamatan yang tajam dan mendalam tentang perkembangan sosial dan kondisi politik global saat itu, Sayyid Qutb mulai terjun dalam dunia kepenulisan tafsir ini. Sayyid Qutb menghabiskan lebih dari 50 tahun untuk membaca dan mempelajari pemikiran manusia dalam berbagai bidang studi, teori, dan agama.

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* ini ditulis dengan tinta penuh rasa sakit dan kesulitan yang disebabkan oleh pemerintah yang tidak adil dan kezaliman yang terjadi pada masa itu. Sayyid Qutb mendapatkan perlakuan yang kejam dan keras, serta kesedihan yang membawanya untuk bergantung pada Allah dan menghargai al-Qur'an, dimana beliau bergantung pada al-Qur'an dengan segenap jiwa dan perasaannya. Hal inilah yang menjadi alasan utama dalam penulisan Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* (Firdaus and Zulaiha, 2023).

Pada awalnya, Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* merupakan sebuah makalah yang diterbitkan oleh majalah "*al-Muslimin*" yang didirikan dan diterbitkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Majalah ini pertama kali dipublikasikan pada edisi ketiga dalam seri tersebut, yaitu pada bulan Februari 1952. Setelah menyelesaikan tujuh artikel, yaitu pada publikasian edisi ketiga dan kesembilan yang membahas ayat

ke 103 dari surah al-Baqarah, Sayyid Qutb mulai merasa terinspirasi untuk menulis tafsir yang mirip dengan artikel-artikel yang telah ditulis di majalah. Sayyid Qutb berencana untuk menulis tafsir al-Qur'an secara lengkap yang terdiri dari 30 Juz yang akan diterbitkan setiap bulan sesuai dengan urutan al-Qur'an dan dengan menggunakan nama yang sama (Alam, 2020).

Sebelum memulai melakukan penafsiran terhadap isi kandungan al-Qur'an, Sayyid Qutb telah melakukan penelitian mendalam selama bertahun-tahun untuk mengungkap rahasia struktur wahyu al-Qur'an dan gaya penyampaian yang indah dan penuh keajaiban (Siregar, 2017). Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, Sayyid Qutb memberikan penekanan pada analisis rasional. Selain itu, Sayyid Qutb juga selalu mengaitkan penafsirannya dengan konteks masa lalu dan masa kini (Zaedi, 2021).



BAB III
ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER SECARA KOMPARATIF
TERHADAP PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN BUYA HAMKA
TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK

A. Konsep Kepemimpinan Politik

1. Definisi Kepemimpinan Politik

Tema kepemimpinan merupakan tema yang menarik untuk di kaji di zaman yang modern ini. Semakin berkembangnya zaman, sebuah negara memerlukan seorang pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan di dalam al-Qur'an. Untuk menjadi seorang pemimpin negara perlu terhubung dengan partai politik. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki peranan penting dalam struktur kepemimpinan negara terlebih untuk negara yang menganut paham demokrasi. Fungsi partai politik bagi negara yang menganut paham demokrasi yaitu sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat yang nantinya akan diserap kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk ketertiban umum (Khotimah and Muwahid n.d.).

Istilah kepemimpinan politik berasal dari dua kata yaitu kepemimpinan dan politik. Kata kepemimpinan berasal dari kata "pemimpin" yang mendapatkan awalan "ke" yang berarti kemampuan dalam memberikan pengaruh kepada pihak lain agar melakukan sesuatu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kata politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang memiliki makna kota yang berstatus negara kota (*city state*). Kata politik ini kemudian masuk ke dalam bahasa

Indonesia kemudian WJS Poerwadarminta mengartikannya sebagai segala urusan atau tindakan yang berkaitan dengan kekuasaan suatu negara atas negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, serta nama sebuah disiplin ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik (Fazira, 2023).

Kepemimpinan merupakan suatu aktivitas mempengaruhi orang lain dan memberikan arahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan bahwa kepemimpinan berjalan dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan) dan berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan) (Kustiawan et al. 2022). Jika dalam konteks spiritual, kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya yang telah diperintahkan melalui Nabi Muhammad saw (Zubaidah n.d.). Kepemimpinan politik yang dimaksud disini yaitu kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan bernegara sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang.

2. Konsep Kepemimpinan Politik

Islam merupakan agama yang komprehensif. Di dalamnya mengandung banyak tatanan seperti tatanan politik, ketatanegaraan, tatanan ekonomi, tatanan sosial dan lain sebagainya. Sebab hal inilah Islam disebut sebagai agama yang lengkap dan sempurna karena mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik dan

ketatanegaraan diperintahkan untuk kembali pada sistem politik dan ketatanegaraan Islam (Zubaidah n.d.).

Di zaman yang modern ini tentunya menginginkan sistem kepemimpinan politik yang ideal. Sebuah kepemimpinan yang ideal tentunya harus memperhatikan aspek-aspek atau karakteristik yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an. Proses perwujudan kepemimpinan yang ideal tentu tidak hanya diwujudkan oleh pemimpin saja, masyarakat yang dipimpin juga turut andil dalam proses perwujudan kepemimpinan yang ideal. Pemimpin serta masyarakat yang dipimpin harus mengetahui karakteristik kepemimpinan yang ideal yang sesuai dengan al-Qur'an. Hal ini dikarenakan pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya memiliki hak dan kewajiban yang harus saling ditunaikan.

B. Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Politik

Berikut ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik:

No	Q.S	Ayat
1.	Q.S An-Nisa [04]: 58	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا
2.	Q.S An-Nisa [04]: 59	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
3.	Q.S Ali-Imran [03]:	فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتِ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ

	159	فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
4.	Q.S Asy-Syura [42]: 38	وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ
5.	Q.S Al-Ma'idah [05]: 51	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
6.	Q.S Sad [38]: 26	يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
7.	Q.S Al-Mu'minun [23]: 08	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۗ
8.	Q.S Al-Ma'arij [70]: 32	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۗ

C. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Politik

1. Penafsiran Q.S an-Nisa [04]: 58

a. Penafsiran Sayyid Qutb

Ayat di atas berisi tentang tanggung jawab dan etika yang hendaknya dimiliki oleh orang Islam, yaitu memberikan amanat kepada

mereka yang berhak untuk menerimanya serta perintah untuk menegakkan keadilan diantara manusia sesuai dengan ajaran Allah swt.

Amanat-amanat yang diterima oleh manusia pastinya dimulai dengan amanat paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya. Amanat ini Allah hubungkan dengan fitrah manusia, yang mana bumi, langit, dan gunung-gunung merasa takut dan tidak mau untuk menanggungnya, tetapi manusia bersedia untuk menanggung amanat ini. Amanat yang dimaksud disini yaitu amanat petunjuk atau hidayah, makrifat atau pengetahuan, dan iman kepada Allah dengan niat, hati yang tulus dan tanpa adanya paksaan, serta kesungguhan hati dan mengikuti arahan. Selain manusia, Allah juga memberikan petunjuk kepada makhluk lainnya untuk beriman kepada-Nya, mengikuti-Nya, mengenal-Nya, menyembah-Nya dan taat kepada-Nya. Mereka juga ditakdirkan untuk mematuhi hukum alam tanpa adaya usaha, niat, keinginan, ataupun perintah. Hanya manusialah yang untuk mencapai kedekatan dengan Allah diserahkan kepada fitrah, akal, pengetahuan, kehendak, dan keinginan mereka yang tentunya disertai dengan bantuan dari Allah.

Selain amanat yang terbesar ini, ada amanat-amanat lain yang oleh Allah diperintahkan untuk dilaksanakan dan telah disebutkan secara umum di dalam nash al-Qur'an. Salah satu amanat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan yaitu amanat untuk

melaksanakan muamalah sesama manusia dengan baik. Muamalah tersebut meliputi amanat yang berupa titipan materi, amanat untuk setia kepada pemimpin, amanat untuk pemimpin agar setia kepada rakyatnya, amanat untuk menjaga dan merawat anak-anak kecil, amanat untuk menjaga kehormatan bersama, harta benda, serta kehormatan wilayah.

Selain membahas tentang perintah menunaikan amanat dengan baik, ayat ini juga menjelaskan tentang perintah untuk berbuat adil dalam memutuskan suatu hukum. Ayat ini menjelaskan bahwa keadilan bersifat mutlak, yaitu berlaku untuk manusia secara keseluruhan baik itu muslim maupun non muslim, baik itu kawan maupun lawan, dan tanpa melihat dari segi perbedaan ras dan warna kulit.

Perintah untuk menetapkan hukum dengan adil dan memenuhi amanat kepada yang berhak menerimanya diiringi dengan peringatan yang menunjukkan bentuk pengajaran dan pengajaran dari Allah Swt. *“Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.”*

Metode penyampaian yang digunakan oleh Allah untuk perintah ini yaitu dengan menggunakan kalimat transformatif. Pada kalimat ini lafadz Allah (*isim jalalah*) didahulukan dan dijadikan “*sebagai isim inna*”, sedangkan lafadz “*ni’ma maa*” diganti menjadi lafadz “*ni’imma*” beserta dengan semua muta’aliqatnya menduduki posisi sebagai “*khabar inna*” setelah membuang khabarnya. Lafadz asli dari

kalimat ini yaitu *“Innahu ni'ma maa ya'izhukumullah bihi”*. Redaksi ini digunakan oleh Allah untuk menunjukkan betapa eratnya antara Allah dengan pengajaran yang diberikan kepada manusia.

Dalam menyampaikan perintah ini, Allah menggunakan kata *‘izhah’* yang memiliki makna pengajaran atau nasihat. Akan tetapi makna yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah dalam kalimat ini yaitu sebagai sebuah perintah bukan sebuah pengajaran. Alasan penggunaan redaksi *‘izhah’* dalam kalimat ini dikarenakan redaksi lebih cepat memberikan pengaruh terhadap perasaan dan menjadikannya lebih dekat untuk dilaksanakan atas dasar rasa suka rela, rasa malu dan atas dasar keinginan.

Pada bagian akhir dari ayat ini diakhiri dengan kalimat yang menghubungkan antara perintah dengan Allah. Hal ini memberikan rasa *muraqabah* (merasakan kehadiran Allah disegala keadaan), rasa takut, dan rasa berharap kepada Allah.

“Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Relevansi yang jelas dan halus terlihat antara tugas-tugas yang diberikan, yaitu menunaikan amanat-amanat dan menjalankan hukum secara adil diantara manusia dengan keberadaan Allah sebagai zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Dengan demikian, Allah selalu mendengarkan dan melihat masalah-masalah terkait amanat dan keadilan. Selain itu, keadilan memerlukan kesadaran dan pengaturan yang baik. Selain itu, juga sangat penting untuk mempertahankan

semua aspek yang mencakup dan semua gejala, serta mempertimbangkan dengan seksama alasan dibalik fenomena eksternal yang melingkupi. Kedua perintah ini yaitu perintah untuk menunaikan amanat dan perintah berlaku adil berasal dari zat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat (Quthb, 2001).

b. Penafsiran Buya Hamka

Q.S an-Nisa ayat 58 ini memberikan pelajaran yang harus dipegang teguh oleh para penguasa, yaitu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (ahlinya). Ketika akan memberikan tanggung jawab atas suatu tugas, hendaknya diberikan kepada mereka yang benar-benar sanggup dan dapat dipercaya untuk mengemban tugas tersebut. Dalam kitab *as-Siasatusy Syar'iyah* Ibnu Taimiyah berkata: *“Maka wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin kepada orang yang cakap untuk melaksanakan pekerjaan itu.”* Sabda Nabi saw.:

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ
مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ (رواه الحاكم في صحيحه)

“Barang siapa yang memegang kuasa dari sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia berikan satu jabatan kepada seseorang, padahal dia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum Muslimin daripada orang yang diangkatnya itu, maka berkhianatlah dia kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum muslimin.” (H.R al-Hakim dala kitab shahihnya)

Umar bin Khattab juga mengatakan bahwa orang yang menjadi pemegang kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan yang dimilikinya ia mengangkat seseorang karena atas dasar rasa pilih kasih atau karena

ada hubungan keluarga, maka pemegang kekuasaan tersebut telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam agar dijumpai orang-orang yang cakap untuk diberi tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan, mulai dari Amir dan qadhi-qadhi (penjaga hukum) dan perwira-perwira serta panglima-panglimanya yang berada dibawah pimpinan penguasa. Semua aspek kekuasaan tersebut hendaknya dipilih berdasarkan kejujuran dan kecakapan yang dimiliki. Dalam memberikan pekerjaan kepada para bawahannya terutama terkait dengan urusan setiap kaum muslimin hendaknya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar. Seseorang yang meminta pekerjaan terlebih dahulu dilarang untuk diberi pekerjaan, seperti dalam sabda Nabi saw.,:

إِنَّ لَانُوْلِيْ أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ

“Kami tidak akan berikan kekuasaan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya.” (H.R Bukhari)

Dalam ayat ini mengandung perintah untuk menjalankan kekuasaan atau pemerintahan dengan baik dan memilih orang yang memiliki kecakapan dalam bidang tersebut adalah hal yang wajib. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa orang yang diberi kuasa untuk memegang urusan terkait pemerintahan maka orang tersebut orang yang mengemban amanat. Urusan pemerintahan kenegaraan tentunya

tidak dapat terlepas dari agama. Seorang muslim, terlebih lagi jika dia seorang pemimpin tentunya tidak dapat bersifat bodo amat terhadap persoalan kenegaraan. Surah an-Nisa ayat 58 ini memberikan perintah untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. *Memerintahkkan kamu*, yang dimaksud *kamu* di dalam ayat ini yaitu ummat atau orang banyak, sehingga ummat tersebut yang membentuk pimpinannya.

Pemimpin atau imam memiliki tanggung jawab untuk memberikan amanah kepada ahlinya, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kecakapan dan kesanggupan yang dimiliki. Pemimpin dilarang memberikan amanat dengan mengutamakan keluarga maupun golongan sedangkan orang yang diberi amanat tidak memiliki kecakapan dalam bidang tersebut. Setiap orang yang menganggap dirinya tidak memiliki kecakapan hendaknya jangan menerima amanat. Akan tetapi, jika masyarakat umum menganggap bahwa dirinya memiliki kecakapan dan hati nurani dari orang tersebut merasa bahwa dirinya diberi amanat karena kecakapan yang dimilikinya, maka hendaknya menerima amanat tersebut.

Pada hakikatnya, setiap manusia diberi bakat dan kecakapan oleh Allah serta setiap orang memiliki amanah yang harus dipikul. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menunaikan amanat yang dipikulnya dengan sebaik mungkin, karena menyia-nyiakan amanat merupakan bentuk pengkhianatan dan khianat merupakan salah satu ciri dari orang munafik.

Jika setiap orang menjalankan amanat dengan baik dan benar maka bangsa dan negaranya akan aman. Hal ini dikarenakan makna kata amanat satu rumpun dengan makna kata aman. Selain itu, kata amanat juga serumpun dengan kata iman. Iman merupakan sebuah kepercayaan sedangkan amanat merupakan sebuah cara agar iman dapat berjalan dengan lancar.

Dalam surah an-Nisa ayat 58 ini Allah lebih dulu menyebutkan kata amanat baru kemudian menyebutkan kata adil. Hal ini dikarenakan amanat asli ada didalam diri manusia. Jika amanat telah ditegakkan dengan baik maka keadilan dapat ditegakkan dengan mudah. Tidak akan ada kejadian dakwa-mendakwa dan tuduh-menuduh yang sampai ke muka dewan hakim.

Pada kesimpulannya, amanat yaitu pesan Allah kepada manusia, yaitu perintah untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul-Nya. Amanat ini sebelumnya telah ditawarkan oleh Allah kepada gunung-gunung dan langit-langit, namun mereka menolak dan merasa berat untuk memikulnya dan hanya manusialah yang berani untuk mengemban amanat ini (Hamka, n.d.).

2. Penafsiran Q.S an-Nisa [04]: 59

a. Penafsiran Sayyid Qutb

Jika pada ayat sebelumnya membahas tentang perintah menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan perintah untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum, kemudian pada ayat ini

akan membahas tentang tolak ukur dalam menunaikan amanat. Pada dasarnya, akal manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan menilai karena akal merupakan salah satu sumber pengetahuan dan petunjuk bagi umat Islam. Hal itu memang dibenarkan. Akan tetapi, akal manusia adalah akal individu dan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam lingkungan tertentu.

Oleh karena itu, harus ada tolak ukur yang jelas dan kuat yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh akal pikiran manusia untuk mengetahui seberapa jauh kebenarannya dan kesalahan yang mereka lakukan. Selain itu, penilaian terhadap akal manusia juga berfungsi sebagai alat bagi individu untuk mengukur bobot keputusan mereka dengan menggunakan tolak ukur yang kokoh, tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor serta tidak terpengaruh oleh keinginan dan hawa nafsu. Tolak ukur yang paling baik dan paling kokoh yaitu tolak ukur yang dibuat oleh Allah yang mengatur segala bentuk kegiatan dalam kehidupan manusia.

Pada Q.S an-Nisa [04]: 59 Allah swt memberikan penjelasan terkait syarat iman, batasan Islam serta kaidah peraturan pokok (kaidah *nizham* asasi). Semua hal tersebut berasal dari Allah swt dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada Allah swt. Allah swt merupakan satu-satunya dzat yang memiliki hak *prerogatif uluhiyah* yaitu hak untuk membuat syariat (kedaulatan hukum). Setiap orang yang beriman

memiliki kewajiban untuk mematuhi kedaulatan hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt yang telah dicantumkan di dalam al-Qur'an. Allah swt mengutus Rasul untuk menjelaskan kedaulatan hukum yang telah dibuat kepada manusia karena Rasul merupakan makhluk Allah yang tidak mengikuti hawa nafsu dalam berbicara dan segala perilakunya.

Seluruh orang yang beriman diwajibkan untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Rasul berarti juga taat kepada Allah dikarenakan Rasul adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk mengemban amanah dan mengajarkannya kepada umat manusia di dalam Sunnahnya. Sunnah dan ketetapan Rasul juga merupakan bagian dari syariat Allah yang wajib untuk dilakukan.

Selain membahas tentang perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ayat ini juga membahas perintah taat kepada *ulil amri*. Yang dimaksud dengan *ulil amri* disini yaitu seorang pemimpin yang berasal dari golongan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang memenuhi syarat keimanan dan batasan keislaman yang diterangkan dalam ayat ini. *Ulil amri* tersebut yaitu mereka yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, serta *ulil amri* yang mengakui bahwa Allah swt satu-satunya zat yang memiliki otoritas hukum dan hak untuk membuat syariat bagi manusia seluruhnya. Selain itu, *ulil amri* yang wajib dipatuhi oleh masyarakatnya yaitu mereka yang menerima hukum dari Allah saja, karena Allah merupakan sumber dari segala

sumber hukum, mengembalikan segala urusannya kepada Allah jika terjadi perselisihan oleh akal dan pikiran dan apabila mereka memahami tanpa nash untuk menerapkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam nash.

Dalam ayat ini, lafadz taat tidak disebutkan lagi sebelum lafadz *ulil amri*. Hal ini menunjukkan bahwa taat kepada *ulil amri* merupakan bentuk pengembangan dari perintah taat kepada Allah dan Rasul, setelah ditetapkan *ulil amri* tersebut berasal dari golongan sendiri (*minkum*) dengan catatan bahwa *ulil amri* tersebut merupakan orang yang beriman dan telah memenuhi syarat-syarat keimanan. Batas-batas ketaatan terhadap *ulil amri* telah ditetapkan oleh as-Sunnah yaitu taat dalam batasan hal-hal yang makruf dan sesuai dengan ajaran syariat.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitabnya, dari al-A'masy Nabi saw., bersabda:

(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)

“*Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf*”

Dalam kitab Bukhari Muslim juga diriwayatkan sebuah hadits dari Yahya al-Qaththan, Nabi saw., bersabda:

(السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ كَرِهًا، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)

“*Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat terhadap apa yang ia sukai atau tidak ia sukai, asalkan tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan menaatinya sama sekali.*”

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ummul Hashiin bahwa Nabi saw., bersabda:

“Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia.”

Berdasarkan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam agama Islam setiap individu diberi amanat atas syariat Allah dan Sunnah Rasul-Nya, iman dan agamanya, akal dan dirinya sendiri, serta tentang posisinya di dunia dan akhirat. Islam tidak menjadikan manusia layaknya binatang yang harus digertak terlebih dahulu baru mau mendengar dan menaati.

Adapun terkait persoalan-persoalan yang tidak ditemukan nashnya maupun persoalan-persoalan yang muncul dengan seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan manusia serta perbedaan-perbedaan yang tidak ditemukan *nash qath’i* yang dapat mengaturnya maka diperlukan sebuah metode yang dapat digunakan sebagai media untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Di dalam ayat ini dijelaskan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang ada agar tidak terombang-ambing tanpa arah dalam menentukan hukum. Metode yang dijelaskan dalam ayat ini yaitu metode ijtihad yang telah ditetapkan batasan-batasannya serta prinsip-prinsipnya dalam melakukan penggalan hukum.

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanla ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya).”

Persoalan-persoalan yang ada tempat kembalinya adalah nash-nash al-Qur'an yang didalamnya mengandung penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi. Apabila tidak ditemukan nash-nash yang mengandung penyelesaian dari persoalan yang ada, maka semua persoalan yang ada dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan syariat Allah. Prinsip-prinsip dalam Islam sudah sangat jelas dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, sehingga hati nurani orang-orang yang menganut agama islam tidak akan tersesat selama mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar agama Islam. Begitu juga dengan persoalan-persoalan yang ada, jika tempat kembalinya adalah syariat Allah maka akan diperoleh kejelasan terhadap penyelesaian dari persoalan tersebut, sehingga persoalan tersebut tidak amburadul dan tidak juga mengambang maupun samar-samar sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang berniat melakukan tipu daya.

“Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”

Syarat beriman kepada Allah dan hari akhir yaitu taat kepada Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri* yang beriman kepada Allah serta menjalankan syariat-syariat Allah dan Sunnah Rasul, serta mengembalikan persoalan yang dihadapi kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) apabila terjadi perselisihan dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, taat kepada Allah, Rasul dan *ulil amri*

juga merupakan hasil dari beriman kepada Allah dan hari kemudian, sehingga tidak ada keimanan bagi mereka yang kehilangan syarat ini dan tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak merasakan dampaknya yang kuat.

“Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Setelah persoalan tersebut diletakkan sebagai syarat oleh nash, kemudian disebutkan juga dalam bentuk nasihat dengan tujuan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan kebahagiaan dalam hal ini, yaitu perihal taat kepada Allah, Rasul dan *ulil amri* sebagaimana kebahagiaan yang diperoleh karena menjalankan amanat dan menegakkan keadilan. Mengikuti syariat Allah dalam menjalankan segala aspek kehidupan akan mendapatkan ridha Allah dan juga pahala akhirat. Selain itu, menjalankan syariat Allah juga akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat baik itu bagi individu maupun bagi masyarakat (Quthb, 2001).

b. Penafsiran Buya Hamka

Setelah ayat 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya serta perintah menegakkan keadilan, kemudian pada ayat 59 ini diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan juga *ulil amri* yang terpilih. Pada ayat ini memberikan penjelasan kepada seluruh manusia terkhusus lagi bagi manusia yang beriman untuk senantiasa taat pada peraturan yang ada. Peraturan pertama yang wajib

ditaati adalah peraturan dzat Yang Maha Tinggi, yaitu peraturan Allah swt. Allah mengutus para Rasul termasuk Nabi Muhammad saw., sebagai penutup para Rasul untuk menurunkan peraturan-Nya. Semua peraturan yang ditentukan oleh Allah swt termaktub di dalam Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui para utusannya. Pokok kandungan dari setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu untuk kebahagiaan dan keselamatan seluruh umat manusia.

Orang-orang yang beriman pertama kali diperintahkan untuk taat kepada Allah swt. Hal ini ditujukan agar manusia ketika berbuat baik semata-mata karena Allah bukan karena merasa segan terhadap manusia lain dan juga bukan karena berharap mendapat keuntungan dunia. Begitu juga ketika meninggalkan perbuatan tercela bukan semata-mata karena takut ancaman yang diberikan oleh manusia. Dengan dasar taat kepada Allah serta iman kepada Allah dan hari akhir, manusia akan menjadi baik dengan sendirinya, karena ia merasa Allah selalu mengawasinya siang dan malam. Puncak dari seluruh ketaatan yaitu taat kepada Allah swt, yang mana tanpa didasari dengan ketaatan kepada Allah undang-undang (peraturan) dalam sebuah negara tidak akan berhasil menjamin keselamatan dan kebahagiaan masyarakatnya.

Setelah perintah taat kepada Allah, kemudian orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Hal ini dikarenakan perintah taat kepada Rasul merupakan kelanjutan dari perintah taat kepada Allah. Banyak perintah dari Allah yang wajib ditaati oleh

seluruh orang yang beriman, tetapi orang-orang yang beriman tidak dapat melaksanakannya jika tidak melihat contohnya. Semua contoh atau teladan tersebut terdapat pada diri Rasul. Banyak orang yang mengaku taat kepada Allah tetapi dia tergolong orang yang tidak beragama karena dia tidak percaya terhadap Rasul, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesempurnaan dalam beragama dinilai dari ketaatan terhadap Rasul. Perintah taat kepada Allah dan Rasul dilaksanakan dengan cara memegang teguh al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian perintah yang ketiga yaitu perintah taat kepada *ulil amri minkum*, yaitu orang-orang yang memiliki kuasa diantara kamu atau daripada kamu. Kata *minkum* memiliki dua makna, yaitu *diantara kamu* dan *daripada kamu*. Maksud dari makna tersebut yaitu mereka yang terpilih adalah sama seperti kamu, terlepas dari mereka terpilih atau diakui karena kekuasaan mereka.

Pada masa Rasulullah, persoalan dalam pemerintahan dibagi menjadi dua. Persoalan semata-mata berkaitan dengan agama maka semua itu menunggu perintah dari Rasul sedangkan Rasul menunggu wahyu diturunkan oleh Allah swt. Persoalan yang kedua yaitu persoalan yang berkaitan dengan urusan umum, seperti persoalan perang, damai, membangun tempat ibadah dan persoalan umum lainnya diserahkan kepada masyarakat dengan menjadikan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. *Ulil amri*

bertugas untuk menjaga berjalannya musyawarah dan kemudian keputusan hasil musyawarah wajib ditaati oleh seluruh masyarakat.

“Maka jika bertikaian kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul.”

Hasil musyawarah akan mudah dijalankan apabila menghasilkan kesepakatan bersama dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Akan tetapi, tidak selamanya musyawarah berjalan dengan mulus. Akan adakalanya terjadi perselisihan antar anggota musyawarah. Jika hal itu terjadi maka kembalikanlah kepada ketentuan Allah dan Rasul yaitu al-Qur’an dan Sunnah serta kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat dan tentunya dengan merujuk pada pendapat-pendapat para ahli atau bisa juga dengan menggunakan qiyas perbandingan.

Apabila setiap anggota musyawarah ingat bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah hal yang paling penting dikarenakan mereka adalah orang-orang yang beriman, maka perselisihan pendapat akan dapat diselesaikan jika hal tersebut telah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika masih saja terjadi perselisihan atas dasar keinginan hawa nafsu, maka tanggung jawab untuk mengambil keputusan berdasarkan ijtihad terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul adalah pemimpin tertinggi (Imam al-A’zham) (Hamka n.d.).

3. Penafsiran Q.S al-Ma'idah [05]: 51

a. Penafsiran Sayyid Qutb

Seruan pada ayat ini ditujukan kepada masyarakat Madinah yang pada saat itu masih menjalin kerja sama dengan Ahli Kitab. Selain itu, seruan ini juga ditujukan kepada masyarakat muslim secara keseluruhan dan berlaku sampai pada hari kiamat. Seruan ini ditujukan agar masyarakat muslim pada saat itu memutuskan secara keseluruhan hubungan dengan Ahli Kitab terlebih lagi dengan Kaum Yahudi dan Nasrani, baik itu dari segi perekonomian dan muamalah, loyalitas dan kesetiaan, maupun ketetangaan dan persahabatan.

Semua kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang terjadi secara alami antara masyarakat Madinah dengan Kaum Yahudi sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, kegiatan yang seperti ini memberi peluang terhadap kaum Yahudi untuk melakukan segala macam bentuk tipu daya terhadap Islam dan para pemeluk agama Islam. Al-Qur'an diturunkan bertujuan untuk membuka pikiran masyarakat muslim agar dapat berpikir logis dalam menghadapi peperangan membela akidah dalam usaha untuk mewujudkan manhaj baru dalam realitas kehidupan. Selain itu, tujuan dari diturunkannya al-Qur'an yaitu untuk membuka kesadaran hati manusia agar mau memutuskan hubungan secara keseluruhan dengan orang-orang yang tidak memeluk Islam dan tidak mau berlindung dibawah naungan agama Islam. Pemutusan hubungan secara keseluruhan bukan berarti

melarang umat islam untuk melakukan toleransi terhadap masyarakat non-islam, melainkan melarang umat Islam untuk memberikan kelayaitasan terhadap masyarakat non-Islam. Kelayaitasan hati umat Islam hanya boleh ditujukan kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman.

“...sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain..”

Ungkapan tersebut merupakan sebuah hakikat yang tidak memiliki kaitannya dengan waktu. Hal ini dikarenakan hakikat tersebut bersumber dari hakikat segala sesuatu. Orang-orang Yahudi atau non-Islam tidak akan memimpin masyarakat muslim dalam makna yang sesungguhnya serta mereka tidak akan melindungi masyarakat muslim dimanapun mereka berada. Sebagian dari kaum Yahudi tersebut memimpin sebagian mereka yang lain dengan tujuan untuk memerangi Nabi dan masyarakat muslim di Madinah. Dan sebagian dari kaum Yahudi yang lain memimpin dari bagian mereka yang lain untuk menyerang masyarakat muslim sepanjang sejarah.

Kalimat *“...sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain..”* ini diungkapkan menggunakan jumlah ismiyyah (kalimat nominal). Kalimat tersebut bertujuan untuk menunjukkan sifat dasar yang kekal abadi. Hakikat ini juga disertai dengan sebab akibat, yaitu apabila seorang Yahudi atau non-Islam menjadi seorang pemimpin maka mereka tidak akan menjadikan orang selain dari golongannya untuk menjadi pemimpin. Jika orang-orang dari golongan Islam ada

yang menjadikan orang selain Islam menjadi seorang pemimpin, maka orang tersebut termasuk dari golongan itu dan dianggap telah melepaskan diri dari sifat dan barisan Islam. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak hanya masuk akal, tetapi juga dapat dilaksanakan.

“..Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka..”

Dengan demikian, orang-orang yang mengangkat pemimpin dari selain Islam dianggap telah menzalimi dirinya sendiri, Allah, dan juga kaum muslimin. Akibat dari kezhalimannya ini menjadikan Allah memasukkan mereka kepada golongan Yahudi dan Nasrani yang telah ia beri kelayatitan. Oleh sebab itu, Allah tidak akan membimbingnya ke jalan kebenaran dan tidak akan membawanya kembali ke jalan Islam (Qutb, 2002).

b. Penafsiran Buya Hamka

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin.”

Seruan diatas memberikan perintah kepada kaum muslimin agar tidak mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Hal itu merupakan akibat dari keimanannya. Jika ia benar-benar beriman maka tidak akan pernah meyerahkan tahta kepemimpinan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jika dia memberikan tahta kepemimpinan ataupun

memberi tahu rahasia yang sepatutnya tidak diketahui oleh kaum Yahudi dan Nasrani, maka dia tidak akan mendapatkan penyelesaian dan hanya menambah rumit permasalahan yang ada.

Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan kaum Yahudi dan Nasrani dengan menggunakan nama kehormatan yang lain yang dimiliki oleh mereka yaitu Ahli Kitab. Para ahli ilmu Balaghah al-Qur'an menyebutkan bahwa mereka tidak pantas untuk disebut dengan "*janganlah kamu ambil Ahlul-Kitab jadi pemimpin*". Hal ini dikarenakan dalam ajaran yang dimiliki oleh Ahli Kitab tidak terdapat ajaran yang memusuhi ajaran tauhid yang Nabi Muhammad saw bawa. Jika dilepaskan dari fanatik terhadap golongan, kitab-kitab yang terdahulu tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an. Akan tetapi, mereka lebih memilih untuk melepaskan Islam yang ada pada diri mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan dan menonjolkan golongan mereka dan kemudian mereka memberi nama diri mereka sendiri dengan sebutan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya mereka telah memilih pada pendirian yang salah.

Kemudian Allah swt melanjutkan firmanNya: "*sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian.*" Kalimat tersebut memiliki makna yang jauh dan dalam. Ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak peduli seberapa banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dihubungi dan diangkat menjadi pemimpin, ingatlah bahwa sebagian yang dekat denganmu akan menghubungi temannya yang lain

yang tidak terlihat menonjol. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak mengikutimu.

“Dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu pemimpin diantara kamu, maka sesungguhnya dia telah termasuk golongan dari mereka.”

Pangkal ayat tersebut menyampaikan bahwa siapa saja yang mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi seorang pemimpin, maka orang yang mengangkat tersebut dianggap telah termasuk sebagai golongan mereka. Selain itu, mereka juga dianggap telah memberikan rasa simpati kepada mereka. Orang yang mengangkat penganut agama lain untuk menjadi pemimpin tidak mungkin jika di dalam hatinya tidak terdapat rasa suka, meskipun rasa sukanya itu belum menjadikannya pindah ke agama orang tersebut secara resmi. Berdasarkan riwayat Abd Humaid, sahabat Nabi yang lebih dikenal dengan Hudzaifah bin al-Yaman berkata:

وَلَيْتِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

“Hati-hati tiap-tiap seorang daripada kamu, bahwa dia telah menjadi Yahudi atau Nasrani, sedang dia tidak merasa.”

Orang yang mengangkat pemimpin dari agama lain belum tentu dia telah berpindah agama. Mereka terkadang masih menjalankan ajaran Islam, hanya saja hakikat Islam yang sesungguhnya sudah lepas dari diri mereka. Mereka tidak merasa keberatan untuk menjual bangsa dan agamanya dengan harga yang sangat murah. Hal ini dikarenakan mereka sangat tertarik dan jiwa mereka telah tergadai kepada bangsa

yang memimpinya. Dalam fakta sejarah, orang-orang yang seperti ini telah banyak dijumpai. Negerinya hancur, agamanya terdesak dan mereka diberikan bintang sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang mereka lakukan. Hal tersebut telah menjadikan mereka termasuk golongan Yahudi dan Nasrani padahal mereka sendiri tidak menyadarinya. Fenomena ini sesuai dengan perkataan sahabat Nabi pada hadits diatas.

“Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Orang yang mengangkat golongan Yahudi dan Nasrani menjadi seorang pemimpin, mereka dianggap telah berbuat zalim, sudah berbuat aniaya. Kata zalim itu sendiri berasal dari kata *zulm* yang memiliki arti gelap. Cahaya yang ada di dalam jiwa mereka telah dicabut oleh Allah sehingga mereka lebih memilih jalan kehidupan yang gelap. Mereka juga dianggap telah memilih musuh agamanya, meskipun tidak menjadi musuh dirinya sendiri.

Dalam sistem pemerintahan Islam, agama Islam membolehkan memberi jabatan kepada penganut agama lain dengan catatan bahwa pemegang jabatan tertinggi adalah dari pihak orang Islam. Pemberian jabatan terhadap penganut agama lain juga harus didasari dengan rasa yakin, tidak merasa khawatir terhadap penganut agama lain yang diberi jabatan tersebut. Jika merasa khawatir maka tidak diperbolehkan untuk memberikan jabatan kepada penganut agama lain (Hamka, 1982).

4. Penafsiran Q.S ali-Imran [03]: 159

a. Penafsiran Sayyid Qutb

“...Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..”

Dalam Islam, prinsip musyawarah telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan. Bahkan Rasulullah juga menjalankan sistem musyawarah tersebut. Syura atau musyawarah merupakan prinsip dasar dimana peraturan Islam tidak akan dibangun diatas prinsip lainnya. Prinsip syura ini sudah dijelaskan di dalam nash yang *qath'i* sehingga tidak akan meninggalkan rasa ragu di hati umat Islam. Semua bentuk dan cara pelaksanaan syura dapat dilaksanakan, bukan hanya sekedar simbol lahiriyah saja yang berasal dari Islam. Hal ini dikarenakan syura adalah sebuah masalah teknis yang dapat berubah sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan umat dan sesuai dengan kondisi hidup mereka.

Bermusyawarah merupakan hal yang penting untuk membuat dasar dalam menghadapi situasi penting dan memasukkan aturan ini kedalam kehidupan umat Islam, meskipun akan ada bahaya yang terjadi ketika menerapkan hasil musyawarah. Selain itu, musyawarah juga digunakan untuk membantah alasan yang lemah yang digunakan oleh orang untuk membatalkan prinsip ini dalam kehidupan umat Islam setiap kali terjadi konsekuensi yang sekiranya dianggap buruk, meskipun dalam bentuk pecahnya barisan seperti halnya yang terjadi

ketika Perang Uhud sedangkan musuh sudah berada di ambang jalan. Hal ini dikarenakan prinsip ini sudah tergadaikan dengan eksistensi umat yang lurus, dan umat yang lurus tersebut lebih penting keberadaannya daripada kerugian lain yang terjadi.

Kegiatan musyawarah tidak boleh berujung pada penundaan dan kegoyahan. Selain itu, musyawarah juga dilarang untuk mengabaikan sikap tawakkal kepada Allah pada akhir perjalanannya. Urgensi dari syura yaitu merubah pemikiran dan memilih solusi yang diajukan. Ketika sudah sampai pada tahap ini maka kegiatan syura berakhir dengan bertawakkal kepada Allah, menghubungkan segala sesuatu dengan tujuan-Nya, dan memasrahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, dan apapun hasil akhirnya, dilakukan dengan penuh tekad dan semangat (Qutb, 2001c).

b. Penafsiran Buya Hamka

Masyarakat muslim Madinah telah tumbuh menjadi masyarakat yang nyata dan Rasulullah selaku makhluk utusan dari Allah dengan sendirinya menjadi Kepala Masyarakat dan Panglima Perang Tertinggi. Wahyu Allah digunakan sebagai Undang-Undang dasar yang qath'i dan tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan Kepala dan Pemimpin Masyarakat yaitu Rasulullah saw.

Rasulullah menegaskan pembagiannya menjadi dua, yaitu urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama yaitu mengenai perihal

ibadah, syariat dan hukum dasar. Semua itu berasal dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw., diperintahkan untuk memimpinya sehingga semua lapisan masyarakat harus taat kepada Nabi Muhammad saw. Sedangkan untuk urusan dunia seperti peperangan dan perdamaian, perekonomian, peternakan, pertanian dan hubungan antar manusia hendaknya dilakukan musyawarah dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadatnya* bagi masyarakat.

Rasulullah saw sudah berulang kali melaksanakan musyawarah sebagai kebijakan yang dimiliki untuk menghadapi persoalan bersama bahkan sebelum diturunkan perintah untuk melaksanakan musyawarah. Ayat yang pertama kali membahas tentang musyawarah yaitu Surah as-Syura ayat 38. Ayat ini menjelaskan bahwa musyawarah merupakan inti atau pokok dalam proses pembangunan negara dan masyarakat Islam.

Pertumbuhan musyawarah dalam Islam hampir sama dengan pertumbuhan demokrasi di kota-kota Yunani Kuno. Demokrasi sudah ada sejak lama. Semua kota memiliki demokrasi sendiri dan semua orang dapat hadir serta menyatakan pendapatnya. Demokrasi dapat berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, tempat, waktu dan ruang.

Rasulullah tidak memberikan wasiat apapun mengenai perincian tatacara dan teknik pelaksanaan musyawarah. Teknik dan tatacara pelaksanaan musyawarah disesuaikan dengan kondisi tempat dan

waktu. Rasulullah tidak memberikan tata cara dan teknik pelaksanaan yang pasti karena teknik pelaksanaan yang sudah ada tidak akan sesuai lagi dengan kondisi zaman yang terus berubah dan mengalami perkembangan. Ijtihad dapat digunakan dalam kondisi dan situasi ini dengan cara apapun. Dapat juga dilakukan musyawarah sebagaimana layaknya pelaksanaan musyawarah yang sesuai dengan prosedur sidang yaitu dengan mengunpulkan suara dan mengambil keputusan.

Ayat 159 surah ali-Imran ini memberikan perintah kepada Rasulullah selaku sebagai pemimpin agar mengajak orang-orang untuk bermusyawarah. *Wa syawirhum fil amri*. Lafadz tersebut memberikan perintah kepada Rasulullah untuk mengadakan musyawarah dengan cara mendengarkan semua pertimbangan kemudian mengadakan pertukaran pemikiran untuk mempertimbangkan masalah dan mudharatnya. Disamping itu, Rasulullah tentu sudah memiliki penilaian dan pertimbangan. Hal tersebut disebut dengan *'azam* yang dalam ayat ini dimaknai sebagai *bulat hati*. *'Azam* ini digunakan untuk menentukan “ya” atau “tidak” nya sebuah keputusan dan keputusan inilah yang nantinya akan menjadi keputusan akhir serta hal hasil keputusan ituah yang menjadi tanggungjawab dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak boleh ragu ketika mengambil suatu keputusan jika dia merasa ragu maka dia dinilai sebagai pemimpin yang gagal.

Rasulullah selaku sebagai pemimpin memberikan pelajaran jika hati kita teguh dan tekad yang dimiliki sudah kuat maka hendaklah

untuk mengambil keputusan dan bertawakkal kepada Allah. Tidak seharusnya ragu dan bimbang serta harus berani untuk menerima segala resiko. Bertawakkal kepada Allah dapat memperkuat hati yang telah berazam. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan kita sebagai manusia sudah cukup dan kita juga percaya bahwa masih ada kekuasaan dan pengetahuan tertinggi diatas kekuasaan dan pengetahuan manusia yaitu Allah swt, Zat yang paling benar keputusannya. Pada saat yang seperti ini pemimpin memberikan keputusan dan seluruh anggota yang ikut musyawarah wajib tunduk dan patuh kepada keputusan pemimpin.

Selain memerintahkan untuk melakukan musyawarah, ayat ini juga memberikan perintah kepada pemimpin untuk berlaku lemah lembut. Allah memberikan sanjungan yang tinggi kepada Rasulullah atas sikap lemah-lembut yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah merasa senang jika sifat lemah-lembut yang dimiliki oleh Rasulullah diteruskan oleh umat Rasulullah. Oleh karena itu, Allah swt memberikan petunjuk terkait dengan “Ilmu Memimpin”. Allah swt berfirman: “karena sekiranya engkau bertindak kasar, berkeras hati, niscaya berserak-seraklah mereka dari kelilingmu.” Orang-orang akan merasa segan untuk mendekat kepada pemimpin yang memiliki sikap kasar dan keras hati. Satu per satu orang-orang akan menjauh dan jika sudah terjadi hal yang seperti ini janganlah menyahkan orang lain

tetapi pemimin tersebut harus melihat kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. (Hamka n.d.).

5. Penafsiran Q.S Sad [38]: 26

a. Penafsiran Sayyid Qutb

Kekhalifahan di muka bumi berkaitan dengan memutuskan suatu hukum dengan benar dan tentunya dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Dalam kaitannya dengan Nabi, mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti emosi orang pertama yaitu orang yang melaporkan permasalahan kepadanya. Dia mengikuti emosi orang yang melaporkan tanpa didasari dengan penyelidikan lebih terhadap kebenaran dari permasalahan yang ada sehingga membuatnya berada pada kesesatan. Dalam ayat ini dijelaskan akibat dari kesesatan yang dilakukan yang berkaitan dengan hukum. Orang yang melakukan kesesatan pada kaitannya dengan hukum maka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari perhitungan.

Pada masa kekhalifahannya, Nabi Daud memperoleh perhatian langsung dari Allah tepat pada kesempatan yang pertamanya. Allah langsung mengingatkan Nabi Daud sehingga tidak sampai melangkah pada kecenderungan yang salah. Allah langsung mengarahkan Nabi Daud kepada jalan yang benar dan mengingatkannya akan kehidupan akhir yang lebih jauh. Peringatan yang Allah berikan ini merupakan bentuk anugerah Allah kepada hambanya yang terpilih. Manusia dengan sifat kemanusiaan yang dimilikinya tentunya bisa saja

mengalami segala rintangan dalam langkahnya. Akan tetapi, Allah langsung menyelamatkannya, memberi ampunan, memberikan pengajaran, memberikan hidayah untuk bertaubat dan menerima taubatnya, serta memberikan berbagai anugerah setelah adanya cobaan.

Sebelum kisah kekhalifahan Nabi Daud sampai pada akhir dalam redaksi al-Qur'an, prinsip kebenaran dalam kekhalifahan di bumi dan dalam proses penentuan hukum diantara manusia dikembalikan kepada asalnya yang besar. Yang dimaksud asal disini yaitu zat yang Agung yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Hal itu lebih dari jabatan kekhalifahan di bumi dan tanggung jawab untuk menetapkan suatu hukum diantara manusia. Zat Allah lebih besar daripada bumi ini dan lebih jauh kehidupannya dibanding dengan kehidupan dunia. Hal ini dikarenakan mencakup segala inti alam semesta dan semua kehidupan akhirat. Risalah yang terakhir berasal dan berdiri di atasnya, serta segala kebenaran yang luas dan mendalam tercantum di dalam al-Qur'an yang memiliki fungsi sebagai penjelas (Quthb, 2004).

b. Penafsiran Buya Hamka

“Hai Daud! Sesungguhnya Kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi.”

Makna dan arti khalifah sudah banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Allah swt hendak mengadakan khalifah di bumi dan Allah menyampaikan pernyataan tersebut kepada para malaikat.

Pemaknaan yang paling dekat terhadap kata khalifah yaitu pelaksana atau pengganti.

Nabi Adam selaku manusia pertama di muka bumi dan dianggap sebagai bapak pertama manusia serta dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Allah menganugerahkan akal budi kepada Nabi Adam agar memperlihatkan kekuasaan Allah kepada para manusia melalui wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi. Selain itu, Allah juga memberikan ilham-Nya kepada manusia yang berfikir sehingga dengan perbuatan manusia itu muka bumi menjadi makmur.

Sedangkan Nabi Daud dapat dikatakan sebagai penerus Nabi Adan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nabi Daud juga menjadi khalifah pertama dari golongannya. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim melalui Bani Israil yaitu dari keturunan Ishak dan Ya'kub. Meninjau dari kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Daud yaitu sebagai raja Bani Israil. Kedudukan khalifah yang dimiliki oleh Nabi Daud tidak semata-mata hanya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi Nabi Daud juga memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Nabi Daud diberi pesan oleh Allah dalam menjalankan kekhalifahannya agar dapat menjalankan kekhalifahannya dengan baik.

Pesan yang pertama yaitu *“Maka hukumlah diantara manusia dengan benar.”* Yang dimaksud hukum yang benar yaitu hukum yang dijalankan dengan penuh keadilan. Jika telah adil maka telah benar juga, dan begitu juga jika telah benar maka telah adil juga. Pesan yang

kedua yaitu *“Dan janganlah engkau perturutkan hawa”*. Hawa merupakan keinginan hati yang didasari oleh rasa kasihan dan marah, sedih atau iba, dan benci ataupun dendam. Jika dalam istilah bahasa asing yang seringkali dipakai dalam bahasa kita, hawa berarti sentimen atau emosi. Seorang penguasa yang memutuskan suatu hukum atas dasar pengaruh hawa maka akan membawa ancaman mara bahaya. *“Niscaya dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.”* Maksud dari penggalan firman Allah tersebut yaitu bahwa siapa saja baik itu penguasa, raja, khalifah, sultan ataupun presiden dalam memutuskan suatu hukum sudah tidak menggunakan keadilan dan hanya mengikuti hawa maka akan memupuskan harapan orang banyak yang menginginkan mendapat perlindungan hukum dan juga keamanan jiwa.

“Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Kekuasaan merupakan suatu ujian yang berat. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dapat membuat orang lupa darimana dia memperoleh kekuasaan itu dan kemudian dia menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang sesuai dengan keinginan hati serta menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam perihal hukum masyarakat hanya akan merasakan batin yang tersiksa dikarenakan banyak pemimpin politik yang gila akan kekuasaan. Pemimpin yang seperti ini nantinya diakhirat akan

mendapatkan azab dari Allah. Seorang penguasa tidak serta merta datang kemudian mendapatkan sebuah jabatan. Dia mendapatkan sebuah jabatan tentunya karena menggantikan penguasa yang sebelumnya. Sebelum dia mendapatkan sebuah jabatan dia bukanlah siapa-siapa yang tidak memiliki wewenang untuk mengatur siapapun. Ketika dia telah meninggal dunia maka dia sudah tidak memiliki jabatan apapun dan dia tinggal menunggu perhitungan diakhirat untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Setiap manusia memiliki kedudukan dan martabat yang sama dihadapan Allah baik itu raja, menteri, budak, maupun hamba sahaya. Yang membedakan mereka dihadapan Allah hanyalah tingkat ketakwaan yang mereka miliki.

Fakhruddin ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya yang dikutip oleh Buya Hamka menyatakan bahwa seorang pemimpin atau penguasa yang memutuskan suatu hukum hanya dengan menuruti hawanya saja dan dia lebih mementingkan kemaslahatan dunia dan dirinya saja maka akan muncul bahaya untuk orang banyak. Pemimpin yang seperti itu akan menjadikan masyarakat sebagai jembatan untuk mencapai tujuannya dan mengorbankan masyarakat demi kepentingan pribadinya. Hal ini akan memunculkan banyak kekacauan dan kerusakan bagi masyarakat serta akan membawa kebinasaan bagi diri pemimpin itu sendiri. Lain halnya dengan pemimpin atau raja yang menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat Allah maka akan

terwujudlah kemaslahatan bagi masyarakat dan tercapainya kemakmuran masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang seperti itulah yang dimaksudkan dalam penggalan ayat: *“Maka hendaklah engkau menghukum diantara manusia dengan benar.”* Jika dipikirkan secara logika menuruti hawa hanya akan membawa pada kesesatan, sedangkan kesesatan akan mendatangkan azab Allah (Hamka, 1982).

6. Penafsiran Q.S al-Mu'minun [23]: 8

a. Penafsiran Sayyid Qutb

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (al-Mu'minun: 8)

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk berjamaah mengemban banyak amanat. Amanat fitrah merupakan amanat yang paling penting. Fitrah diciptakan oleh Allah selalu sesuai dan selaras dengan Pencipta kehidupan yang merupakan sumber dari fitrah. Dalam fitrah, dia bersaksi tentang keesaan dan keberadaan Sang Khalik. Perasaan ini juga merasakan keesaan dan keberadaan Sang Pencipta mengaturnya dan mengatur seluruh alam semesta, serta kesatuan kehendak yang diinginkan oleh Pencipta untuk mengatur seluruh alam semesta ini.

Setiap orang yang beriman wajib menjaga amanat mereka yang paling besar. Mereka bersumpah dengan keesaan dan keberadaan Sang Pencipta dan berusaha teguh untuk tetap menjaga amanat yang mereka

miliki dan tidak membiarkan amanat tersebut melenceng dari keistiqamahan yang mereka miliki. Setelah keberadaan amanat yang paling besar itu, kemudian dibelakangnya banyak berjejer amanat-amanat yang lain.

Selain mengemban amanat, manusia juga memiliki janji dengan Allah. Janji fitrah adalah janji yang paling pertama yang diikrarkan oleh manusia. Allah menetapkan janji pertama ini berdasarkan fitrah manusia yaitu ketentuan untuk beriman kepada ketauhidan atau keesaan dan Wujud dari keberadaan Allah. Janji dan ikrar-ikrar yang lainnya dibangun dan dijalin di atas janji yang pertama ini, dan disetiap janji yang diucapkann oleh manusia tentunya Allah selalu menjadi saksi atas janji-janji tersebut. Wujud ketakwaan dan rasa takut kepada Allah diwujudkan dengan pemenuhan terhadap semua ikatan dan juga janji yang telah dibuat.

Secara umum, manusia bertanggung jawab terhadap semua amanat dan juga terhadap semua janji-janjinya yang telah diikrarkan dihadapan Allah dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Ayat 8 dari surah al-Mu'minun ini memberikan gambaran terkait sifat yang dimiliki oleh orang mukmin yaitu senantiasa menjaga amanat dan juga memenuhi segala janji yang telah diikrarkan. Sifat yang seperti ini akan selalu menempel pada setiap individu yang mengaku sebagai orang yang beriman.

Amanat yang tidak ditunaikan kepada ahlinya dan juga janji-janji yang tidak dijaga dengan baik tidak akan mewujudkan kehidupan jamaah atau kehidupan masyarakat yang teratur dan tegak lurus. Berdasarkan prinsip dasar inilah yang membentuk institusi kehidupan bersama, dan pentingnya menjaga kepercayaan, ketenangan dan keamanan. Dengan hal ini setiap individu akan merasakan ketenangan dan keamanan (Qutb, 2004).

b. Penafsiran Buya Hamka

“Dan orang-orang yang menjaga dengan baik terhadap amanat dan janjinya.” (al-Mu’minun: 8)

Para individu telah dibangun dan diberikan perlindungan, jiwa dan tubuh mereka telah disucikan ketika mereka masuk ke dalam gelanggang kemasyarakatan, dan rumah tangga yang bahagia yang terlepas dari bahaya prostitusi dan immoralitas sudah diwujudkan. Dengan demikian, niscaya tujuan akhir dari sebuah negara yaitu negara yang adil dan makmur akan terwujud.

Setiap individu memikul amanat mereka dengan baik. Amanat itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu amanat raya dan amanat pribadi. Amanat raya yaitu amanat yang diberikan Allah kepada manusia sebagai *khalifah fil-Ardh*. Hanya manusialah yang menerima amanat ini, bahkan gunung-gunung, bukit-bukit, langit-langit dan bumi pun enggan menerima amanat ini. Hanya hati seorang mu’min yang mampu untuk memikul amanat ini. Allah menganugerahkan kepada

seorang mu'min hati yang luas bahkan lebih luas dari langit dan bumi dan bahkan lebih tinggi dari gunung dan bukit. Sedangkan amanat pribadi yaitu tugas masing-masing individu sesuai dengan kadar kesanggupan, nasib dan bakat pribadi itu sendiri. Allah memberi peringatan bahwa tugas kehidupan hanya terkait dengan pembagian pekerjaan, bukan tentang kehinaan dan kemuliaan. Orang yang takwa adalah orang yang lebih mulia disisi Allah.

Setiap orang memiliki derajat yang sama dihadapan Allah, hanya saja tugas yang diemban berbeda-beda. Asalkan setiap orang mengemban tugasnya dengan baik, maka akan tercapai suatu negara yang adil dan makmur. Karena itu, peganglah amanat-amanat yang dimiliki dengan baik dan kembalilah kepada mereka jika pada awalnya kalian telah salah pilih.

Selain manusia mengemban tugas amanat, manusia juga mengemban janji. Negara terbentuk atas janji-janji. Janji rakyat akan setian dan tunduk, janji penguasa akan menegakkan keadilan, janji abdi negara dengan kedisiplinannya yang keras, janji negara dengan negara, janji bangsa dengan bangsa, sumpah atau janji di parlemen, sumpah dan janji seorang menteri ketika hendak dilantik, janji polisi yang senantiasa akan menjaga keamanan, dan berbagai macam janji lainnya. Hal-hal inilah yang nantinya akan bersatu padu membentuk kontrak sosial atau janji masyarakat. Dengan memelihara amanat dan

janji maka dapat memperkuat individu, ketauhidan, kemasyarakatan, kerumahtanggaan dan bahkan kenegaraan (Hamka, 1982a).

7. Penafsiran Q. S al-Ma'arij [70]: 32

a. Penafsiran Sayyid Qutb

“Juga orang-orang yang memikul amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janji-janjinya.” (al-Ma'arij: 32)

Menjaga amanat dan janji-janji merupakan standar akhlak dalam agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kemasyarakatan. Menjaga amanat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia merupakan awal mula dari menjaga amanat dan janji-janji yang lain. Amanat terbesar ini awalnya ditawarkan oleh Allah kepada langit-langit, bumi, dan gunung-gunung akan tetapi mereka semua menolak amanat tersebut. Mereka khawatir melakukan pengkhianatan atas amanat itu dan akhirnya manusialah yang bersedia untuk mengemban amanat itu.

Amanat yang dimaksud yaitu menjalankan komitmen dan akidah tanpa adanya suatu paksaan. Sedangkan perjanjian yang pertama kali diucapkan oleh manusia yaitu ketika manusia itu sendiri masih berada dikandungan. Manusia berikrar bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan mereka. Selanjutnya, dari amanat dan janji-janji kemudian muncul amanat dan janji-janji lainnya dalam interaksi dengan manusia lain di dunia. Persoalan amanat dan janji ini agama Islam menjaganya dengan sangat ketat. Islam mempertegas dan menyebutkannya

berulangkali agar masyarakat terbentuk atas dasar kepercayaan yang kokoh. Selain itu, amanat dan janji-janji yang ditunaikan dengan baik juga menjadi ciri-ciri orang yang beriman sedangkan pengkhianatan terhadap amanat dan janji merupakan ciri-ciri jiwa yang kafir dan munafik. Dalam tradisi Islam, amanat dan janji sangatlah penting sehingga banyak disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah (Qutb, 2001a).

b. Penafsiran Buya Hamka

“Dan orang-orang yang terhadap kepada amanat dan janji, mereka pelihara.” (al-Ma’arij: 32)

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat utama orang yang melaksanakan shalat. Mereka tetap melaksanakan shalat dan hikmah dari shalatnya itu menjadikan mereka memegang dengan teguh amanat dan janji mereka dan berusaha agar tidak mengkhianati amanat dan tidak mengingkari janji. Jika janji dan amanat sudah tidak terjaga lagi maka penyakit munafik telah menyerang dan sulit untuk diobati.

Kata amanat serumpun dengan kata iman, amin serta aman dan makna pokoknya yaitu kepercayaan. Misalnya, seorang ayah yang meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, maka anak-anak kecil itu menjadi amanat bagi keluarga sang ayah, dan amanat ini wajib untuk dijaga.

Sedangkan kata *'ahad* berarti janji. Jaji berjalan beriringan dengan amanat. Jika telah berjanji akan melakukan sesuatu atau menyanggupi akan sesuatu maka harus dipenuhi. Janganlah membuat janji jika sekiranya tidak mampu untuk memenuhinya. Hal ini dikarenakan hubungan antar manusia hanya diikat dengan janji dan amanat. Mengkhianati amanat dan mengingkari janji sama saja dengan membinasakan peri kemanusiaan. Semua ilmu ekonomi termasuk ilmu yang tertinggi didasarkan pada amanat dan janji. Semua hubungan antar manusia adalah amanat, politik dan diplomasi merupakan janji. Jika amanat dan janji tidak dijaga dengan baik, lalu apalagi yang dipegang dari yang diucapkan oleh lidah manusia kalau bukan janji? Semua tunggak-tunggging yang dia lakukan dalam shalat tidak ada gunanya jika tidak memelihara amanat dan janji dengan baik (Hamka, 1982a).

8. Penafsiran Q.S asy-Syura [42]: 38

a. Penafsiran Sayyid Qutb

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka....”

Ayat 38 dari surah as-Syura ini bertujuan agar kehidupan manusia diwarnai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, salah satunya yaitu memutuskan suatu persoalan dengan jalan musyawarah. Ayat ini diturunkan sebelum berdirinya sistem pemerintahan dalam Islam dan tergolong sebagai surat makiyyah. Sifat

yang seperti ini menjadi karakter masyarakat Islam diberbagai keadaan meskipun konsep pemerintahan yang khas belum terbentuk. Oleh karena itu, sifat ini lebih melekat pada diri masyarakat Islam dibandingkan pada sistem pemerintahan.

Pemerintahan dalam islam muncul tidak lain karena kebiasaan masyarakat dan sifat dari masing-masing individunya. Untuk itu, masyarakat lah yang menjaga dan mendorong pemerintahan agar mengimplementasikan manhaj Islami serta memberikan perlindungan terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Sejak dini, masyarakat sudah mulai menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Cakupan musyawarah lebih luas daripada pemerintahan dan semua aspek hukumnya. Dalam kehidupan masyarakat Islam, musyawarah merupakan satu aspek penting dan menjadi standar keistimewaan masyarakat yang dipilih untuk dijadikan sebagai contoh untuk orang lain. Sifat ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh pribadi muslim dari sekian banyak sifat-sifat lain yang dapat dijadikan sebagai contoh.

Dalam membentuk sistem musyawarah yang ideal tidak seperti menuangkan cairan kedalam cetakan. Melainkan musyawarah dilakukan sepenuhnya sesuai dengan situasi dan kondisi disetiap waktu dan tempat agar sifat ini dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat Islam. Pada dasarnya, tatanan dalam Islam tidak terbentuk dari bentuk yang sudah mati ataupun teks asli. Musyawarah pada dasarnya

merupakan semangat yang timbul dari hakikat keimanan di dalam hati dan penyesuaian sikap serta perasaan dengan hakikat tersebut.

Tanpa melakukan pertimbangan secara mendalam terhadap hakikat keimanan, maka penelitian terhadap sistem tatanan keislaman tidak akan membuahkan hasil apapun. Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman terkait akidah Islam menganggap hal ini sebagai pernyataan umum yang tidak memiliki batasan. Aspek psikologis dan intelektual tercakup dalam ruang lingkup akidah Islam. Akidah Islam ini keberadaannya memang nyata dan berfungsi serta mampu memberikan pengaruh terhadap manusia. Manusia mampu menghasilkan tatanan dan situasi tertentu dalam kehidupan dikarenakan ada faktor yang mampu membangun diri manusia itu sendiri.

Selanjutnya, berbagai bentuk tatanan dan situasi ditunjukkan dengan datangnya nash-nash yang menjelaskan tatanan dan situasi tersebut. Manusia tidak diminta untuk membuat dan mengadakan tatanan dan situasi tersebut melainkan hanya diperintah untuk menata tatanan dan situasi tersebut. Keberadaan masyarakat muslim dan keimanan yang efektif serta memiliki pengaruh sangat dibutuhkan agar terwujud bentuk tatanan yang tertata dengan baik. Tanpa adanya masyarakat yang seperti itu maka sistem yang Islami tidak akan terwujud serta bentuk tatanan yang ada tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Jika dalam hati seorang muslim ditemukan keimanan dan kebenaran maka secara substansial sistem islami akan tumbuh dan bentuk tatanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Islam akan berdiri tegak dalam berbagai kondisi dan situasi kehidupan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip Islam yang komprehensif juga akan terbentuk dengan baik dan benar (Qutb, 2001b).

b. Penafsiran Buya Hamka

“Sedang urusan-urusan mereka adalah dengan musyawarat diantara mereka.”

Berdasarkan penggalan ayat tersebut, diketahui bahwa urusan manusia terbagi menjadi dua yaitu urusan pribadi dan urusan bersama. Yang berkaitan dengan urusan bersama dilakukan dengan jalan musyawarah agar sesuai dengan peribahasa *‘berat sama dipukul, ringan sama dijinjing.’* Oleh karena itu, penggalan ayat ini dikaitkan dengan penggalan ayat *“ Dan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan, mereka nafkahkan.”* Suatu musyawarah yang membahas urusan bersama tidak akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak ada yang berkenan memberikan sebagian kepemilikannya untuk urusan bersama.

Inti dari ayat ini yaitu menjelaskan bahwa hasil keimanan seseorang tidak hanya untuk pribadinya sendiri. Bukan juga sebatas hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi terdapat juga hubungan manusia dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pada ayat ini

dikaitkan dengan persoalan shalat yaitu shalat jum'at dan shalat jamaah. Shalat jum'at dan shalat jamaah merupakan dasar daripada hidup bermasyarakat. Manusia tumbuh dalam kepentingan bersama kemudian ditanggung bersama. Hal yang seperti ini dapat disebut sebagai gotong royong atau demokrasi. Semua masyarakat memberikan sebagian rezeki yang dimilikinya untuk urusan bersama. Rezeki disini bersifat umum, tidak harus berupa harta benda. Tenaga, fikiran, keahlian, ilmu, dan juga pengalaman juga termasuk dari rezeki. Shalat, berjamaah, musyawarah, dan menafkahkan rezeki merupakan satu nafas. Hal ini kemudian disebutkan oleh Prof. Dr. Hazairin SH seorang sarjana Hukum Indonesia sebagai "*menjadikan seluruh tanah air Indonesia satu mesjid.*" Terkait tata cara pelaksanaan musyawarah tidak ada ketentuan secara pasti. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan kondisi, pola pikir, ruang dan waktu (Hamka, 1982c).

Berikut ini tabel penafsiran untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penafsiran dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka:

Q.S	Sayyid Qutb	Buya Hamka
An-Nisa: 58	Menafsirkan bahwa ayat ini memberikan perintah kepada setiap orang baik itu muslim atau non-muslim untuk menunaikan amanat kepada ahlinya dan	Ayat ini memberikan pelajaran yang harus dipegang teguh oleh para penguasa. Perintah tersebut yaitu perintah menunaikan amanat

	<p>juga perintah untuk berbuat adil. Perintah ini bersifat mutlak.</p>	<p>kepada yang berhak menerimanya. Penguasa wajib memberikan amanat sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Jika amanat telah ditegakkan dengan baik maka keadilan juga akan berdiri tegak. Menyia-nyiakan amanat merupakan salah satu bentuk pengkhianatan dan khianat adalah salah satu ciri orang munafik.</p>
<p>An-Nisa 59</p>	<p>Setiap orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul. Selain itu, orang yang beriman juga diperintahkan untuk taat kepada <i>ulil amri</i> (pemimpin). Taat kepada pemimpin merupakan wujud pengembangan dari perintah taat kepada Allah</p>	<p>Ayat ini memberikan perintah terutama kepada orang-orang yang beriman agar selalu taat pada peraturan yang ada. Buya Hamka menyebutkan bahwa ayat ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu taat kepada Allah swt, taat kepada</p>

	<p>dan Rasul, dengan catatan pemimpin tersebut merupakan orang yang beriman dan telah memenuhi syarat-syarat keimanan.</p>	<p>Rasul, dan taat kepada <i>ulil amri</i> (pemimpin) yang telah terpilih baik itu dengan cara ditunjuk atau dipilih.</p>
<p>Al-Ma'idah: 51</p>	<p>Ayat ini melarang kaum muslimin untuk mengangkat pemimpin dari kaum Yahudi dan Nasrani. Orang yang mengangkat pemimpin dari selain Islam dianggap telah menzalimi dirinya sendiri, Allah, dan juga kaum muslimin, serta termasuk ke dalam golongan kaum Yahudi dan Nasrani.</p>	<p>Ayat ini memberikan larangan kepada kaum muslimin untuk mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan konsekuensi dari keimanannya. Bagi siapa saja yang mengangkat pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani maka termasuk dari golongan itu. Orang yang mengangkat pemimpin dari selain Islam maka hakikat keislaman sudah terlepas dari diri mereka</p>

		dan mereka dianggap telah berbuat zalim (aniaya).
Ali-Imran: 159	<p>Ayat ini menjelaskan bahwa syura merupakan prinsip dasar dibangunnya peraturan Islam. Bermusyawarah adalah hal yang penting untuk membuat dasar dalam menghadapi situasi penting dan memasukkan aturan ini ke dalam kehidupan manusia meskipun nantinya akan ada bahaya yang terjadi ketika menerapkan hasil musyawarah. Musyawarah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membantah alasan lemah yang digunakan oleh orang untuk membatalkan prinsip ini dalam kehidupan Islam</p>	<p>Ayat ini memberikan perintah kepada Rasulullah agar mengadakan musyawarah dengan mendengarkan semua pertimbangan dan kemudian mengadakan pertukaran pemikiran untuk mempertimbangkan masalah dan mudharatnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan perintah kepada pemimpin agar berlaku lemah lembut.</p>

	setiap kali ada dampak yang dianggap buruk.	
Q.S Sad 28	<p>Ayat ini menjelaskan kepemimpinan pada masa Nabi Daud. Kepemimpinan di muka bumi berkaitan dengan memutuskan suatu hukum dengan benar dan tidak mengikuti hawa nafsu. Kepemimpinan yang seperti ini dicontohkan oleh Nabi Daud yang pada saat itu mendapat bimbingan langsung dari Allah swt. Prinsip kebenaran dan proses penentuan hukum diantara manusia pada saat itu dikembalikan kepada asalnya yang besar, yaitu Zat yang Agung.</p>	<p>Ayat ini berisikan pesan-pesan Allah kepada Nabi Daud dalam menjalankan kekhalifahannya di muka bumi. Pesan yang pertama yaitu menjalankan hukum dengan penuh keadilan. Pesan yang kedua yaitu tidak menuruti hawa ketika memutuskan hukum. Hal ini dikarenakan menuruti hawa ketika memutuskan suatu hukum akan membawa ancaman bahaya, salah satunya yaitu memupuskan harapan orang banyak yang menginginkan perlindungan hukum dan keamanan.</p>

<p>Q.S al-Mu'minun 8</p>	<p>Ayat ini berisi gambaran sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman yaitu senantiasa menjaga amanat dan memenuhi semua janji yang sudah diucapkan. Amanat yang dimiliki oleh manusia yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu percaya pada keesaan dan keberadaan sang Khalik, sedangkan janjinya yaitu janji untuk beriman kepada keesaan dan keberadaan Allah.</p>	<p>Ayat ini berisi tugas manusia dimuka bumi, yaitu tugas untuk menjalankan amanat dengan baik serta mengemban janji-janji. Amanat itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu amanat raya (sebagai <i>Khalifah fil-ardh</i>) dan amanat pribadi. Sedangkan amanat pribadi yaitu tugas masing-masing individu sesuai kadar kesanggupan. Ketauhidan, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, dan kenegaraan bisa semakin kuat jika amanat dan keadilan telah ditegakkan dengan sebaik mungkin.</p>
<p>Q.S al-Ma'arij 32</p>	<p>Ayat ini menjelaskan bahwa menjaga amanat dan janji-janji menjadi</p>	<p>Ayat ini berisikan penjelasan tentang orang-orang yang berusaha</p>

	<p>standar akhlak dalam agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kemasyarakatan. Amanat yang dimaksud disini yaitu berkomitmen dan menjalankan akidah penuh dengan kerelaan (tanpa adanya paksaan) sedangkan janji yang pertama kali diucapkan oleh manusia yaitu janji untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan mereka. Janji dan amanat ditunaikan dengan baik adalah ciri-ciri orang beriman sedangkan pengkhianatan terhadap janji dan amanat merupakan ciri-ciri jiwa kafir dan munafik.</p>	<p>memegang teguh amanat dan juga janji yang telah dibuat. Mereka berusaha agar tidak mengkhianati amanat dan tidak mengingkari janji. Sebab jika amanat dan janji sudah tidak terjaga lagi merupakann tanda bahwa hati telah diserang oleh penyakit munafik dan susah untuk diobati. Mengkhianati amanat dan mengingkari janji dianggap telah membinasakan peri kemanusiaan. Hal ini dikarenakan hubungan antar manusia hanya diikat oleh janji dan amanat.</p>
Q.S as-	Tujuan diturunkannya ayat	Ayat ini menjelaskan

Syura 38	<p>ini yaitu agar manusia mewarnai kehidupannya dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Salah satu sifat itu yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Masyarakat sudah menerapkan musyawarah sejak dini untuk menyelesaikan segala macam persoalan bahkan sejak sebelum konsep kepemimpinan yang khas terbentuk. Hal ini dikarenakan cakupan musyawarah lebih luas daripada pemerintahan dan semua aspek hukumnya. Musyawarah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan</p>	<p>bahwa setiap manusia memiliki dua urusan yaitu urusan pribadi dan urusan bersama. Untuk urusan bersama diselesaikan dengan cara musyawarah agar terasa lebih ringan. Pelaksanaan musyawarah itu sendiri tidak ada ketentuan pastinya, semuanya disesuaikan dengan kondisi, pola pikir, ruang dan waktu.</p>
----------	--	--

	sebagai standar keistimewaan masyarakat yang dipilih untuk dijadikan contoh.	
--	---	--

D. Analisis Hermeneutika Gadamer Secara Komparatif

Dalam memahami teks dengan menggunakan teori Hermeneutika Gadamer terdapat beberapa rumusan teori yang dikemukakan oleh Gadamer, diantaranya teori kesadaran akan pengaruh sejarah, teori pra-pemahaman, teori *fusion of horizons*, dan teori penerapan (aplikasi). Berdasarkan empat teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori hermeneutika Gadamer mengandung historisasi Teori Kesadaran akan Pengaruh Sejarah, Teori Pra-Pemahaman (prasangka), dan pemahaman terhadap teks (*fusion of horizons*).

1. Teori Prasangka (*Vorurteil*)

Menurut Gadamer, situasi hermeneutik memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh terhadap pemahaman mufasir (pembaca) terhadap teks. Sahiron Syamsudin menjelaskan bahwa pra-pemahaman (prasangka) merupakan prasyarat bagi mufasir untuk melakukan dialog dengan teks yang kemudian ditemukan pemahaman yang akurat. Dengan demikian, pra-pemahaman (prasangka) memiliki tujuan untuk memandu mufasir memperoleh pemahaman yang tepat dan mendalam. Pra-pemahaman (prasangka) dapat diperoleh dari berbagai pengalaman atau

latar belakang kehidupan yang dimiliki oleh mufasir (pembaca) (Mu'tazza, 2022).

Dalam kaitannya dengan pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik tentunya juga tidak terlepas dari pra-pemahaman (prasangka). Sayyid Qutb yang memiliki pengalaman melawan penindasan yang dilakukan oleh pemimpin yang berkuasa pada saat itu dan merasakan kehidupan didalam penjara. Hal tersebut menyebabkan penafsirannya pada ayat-ayat tentang kepemimpinan politik lebih condong pada perlawanan melawan penindasan. Berdasarkan pengalaman yang dialami yaitu merasakan ketidakadilan dari penguasa pada saat itu, Sayyid Qutb berkeinginan untuk menciptakan sistem kepemimpinan yang jauh lebih baik kualitasnya, yaitu menegakkan dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya.

Berikut ini prasangka awal pemikiran Sayyid Qutb terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik:

- a. Pada Q.S an-Nisa [04]: 58 dan 59, Sayyid Qutb berpendapat bahwa kedua ayat tersebut berbicara tentang perintah untuk berbuat adil, taat kepada Allah, Rasul serta pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Sayyid Qutb menginterpretasikan kedua ayat ini dalam konteks perjuangan menegakkan syariat Islam. Menurut Sayyid Qutb menjadi seorang pemimpin harus mampu menegakkan hukum Allah secara mutlak.

- b. Pada Q.S al-Ma'idah [05]: 51 berbicara mengenai larangan mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Menurut Sayyid Qutb, kalangan Yahudi dan Nasrani tidak akan mempertahankan nilai-nilai keislaman selama berjalannya kepemimpinan yang mereka pimpin.
- c. Kemudian pada Q.S ali-Imran [03]: 159, Sayyid Qutb berpandangan bahwa musyawarah dijadikan media dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara sahabat.
- d. Pada Q.S Sad [38]: 26, Sayyid Qutb berpendapat bahwa keadilan merupakan aspek penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.
- e. Kemudian Q.S al-Mu'minun [23]: 8 dan Q.S al-Ma'arij [70]: 32 Sayyid Qutb berpendapat bahwa ayat ini memberikan perintah bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya dan menjaga amanah tersebut dengan baik.
- f. Pada Q.S asy-Syura [42]: 38, Sayyid Qutb berpendapat bahwa musyawarah digunakan sebagai media untuk menyelesaikan masalah dan menentukan kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pemikiran Buya Hamka lebih condong pada perjuangan umat Islam Indonesia dalam mempertahankan identitas islam. Hal ini dikarenakan latar belakang yang dimiliki oleh Buya Hamka yaitu seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga pengalaman sebagai ulama. Buya Hamka berpandangan bahwa jabatan kepemimpinan bukanlah

sebatas kekuasaan, tetapi sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berikut ini prasangka awal pemikiran Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik:

- a. Pada Q.S an-Nisa [04]: 58, Buya Hamka berpendapat bahwa ayat tersebut berisikan perintah untuk berbuat adil dalam penegakkan hukum.
- b. Pada Q.S an-Nisa [04]: 59 berisi perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin yang adil.
- c. Kemudian pada Q.S al-Ma'idah [05]: 51 berisikan larangan mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Islam.
- d. Pada Q.S ali-Imran [03]: 159 berisikan perintah untuk menetapkan keputusan dengan jalan musyawarah dan bersikap bijaksana ketika menghadapi masalah atau konflik.
- e. Kemudian pada Q.S Sad [38]: 26 memberikan penekanan bahwa dalam mengatur kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan keadilan dan kesetaraan.
- f. Pada Q.S al-Mu'minu [23]: 8 dan Q.S al-Ma'arij [70]: 32 berisi perintah untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan.

g. Pada Q.S asy-Syura [42]: 38 berisi perintah untuk menjaga musyawarah sebagai metode untuk mencapai kesepakatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Pengaruh Sejarah

Dalam memahami teks dengan menggunakan hermeneutika Gadamer ini ditegaskan bahwa selama proses pemahaman terhadap teks harus disertai dengan keterbukaan terhadap segala sudut pandang baru yang kemungkinan akan muncul dalam proses pemahaman. Oleh karena itu, terdapat aspek yang harus benar-benar diperhatikan dalam proses pemahaman teks, yaitu kesadaran terhadap bias-bias yang mungkin terjadi pada saat proses pemahaman berjalan.

Gadamer membedakan pemahaman terkait dengan teks menjadi dua macam, yaitu kebenaran tentang maksud yang dituju dan kebenaran tentang isi teks. Menurut pandangan Gadamer, pemahaman terhadap kebenaran isi teks yaitu teks asli itu sendiri, sedangkan pemahaman terhadap maksud yang dituju yaitu pemahaman terhadap suatu kondisi seperti tradisi, budaya, dan lainnya yang memberikan pengaruh terhadap penulis teks. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap proses penulisan teks (Subangga, 2022).

Pemikiran Sayyid Qutb pada Tafsir Fi Zhilalil Qur'an terutama pada konteks kepemimpinan politik tentunya dipengaruhi oleh latar belakang kondisi wilayah internal dan eksternal. Kondisi wilayah internal meliputi tiga hal, *pertama* yaitu kehidupan masyarakat yang berorientasi

pada asas materialisme dan nilai-nilai moral mengalami kemerosotan secara drastis yang merupakan pengaruh dari budaya Barat. *Kedua*, kondisi pemerintahan Mesir yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, diman pemerintah yang berkuasa pada saat itu berkeinginan untuk memisahkan antara agama dan negara. Ketiga, masuknya wacana Islam yang dibawa oleh tokoh-tokoh Islam “fundamentalis” yang bertujuan untuk menjaga dasar ajaran Islam yang sebenarnya. Sedangkan Wilayah eksternal yang mempengaruhi pemikiran Sayyid Qutb pada konteks kepemimpinan politik yaitu adanya isu global dimana bangsa-bangsa Barat mendukung pembentukan negara Yahudi dan Nasrani (Wahyuni, 2022).

Latar belakang kesejarahan yang dimiliki oleh Sayyid Qutb berpengaruh pada hasil penafsirannya. Contohnya yaitu pada penafsirannya terhadap Q.S al-Ma’idah [05]: 51. Menurut Sayyid Qutb ayat tersebut berisi larangan mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Hal itu dikarenakan jika tahta kepemimpinan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani maka mereka tidak akan memberikan perlindungan kepada orang Islam. Penafsiran Sayyid Qutb pada ayat ini dikaitkan dengan sikap kaum Nasrani Barat yang sangat memusuhi Islam. Mereka senantiasa mengobarkan peperangan dan tipu daya yang mana sifat tersebut sama dengan sikap yang dimiliki oleh kaum Yahudi dan Nasrani disetiap zaman. Hal itu berakibat warga Habasyah (Ethiopia) yang pada awalnya telah menerima agama Islam dan para pemeluknya kini telah

kembali memusuhinya sama seperti sikap yang dimiliki oleh kaum Yahudi (Qutb, 2002).

Adapun pemikiran Buya Hamka pada karyanya yang berjudul Tafsir al-Azhar juga dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang dimiliki oleh Buya Hamka terutama pada konteks kepemimpinan Islam. Semasa hidupnya Buya Hamka seringkali terjun dalam dunia politik. Karena hal tersebut proses penulisan Tafsir al-Azhar terutama mengenai konteks kepemimpinan tidak terlepas dari lingkup politik. Semasa hidupnya Buya Hamka merasakan ketidakadilan dari pemerintah. Buya Hamka dipenjara atas tuduhan terlibat dalam konspirasi pembunuhan terhadap Presiden Sekarno dan Menteri Agama Syaifuddin Zuhri, padahal tuduhan tersebut tidak terbukti sama sekali akan tetapi Buya Hamka tidak mendapat keadilan dari pihak pemerintah (Halimatussa'diyah et al. 2024). Selain itu, kritik Hamka yang ditujukan kepada penguasa pada saat itu yang menyebutkan bahwa penguasa tidak akomodatif dan aspiratif pada musyawarah negara juga menyebabkan konflik antara Hamka dengan penguasa pada saat itu. Hamka dianggap telah berkhianat pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan NASAKOM (Zulaiha, Agustin, and Rahman, 2022).

Pengaruh latar belakang sejarah yang dimiliki oleh Buya Hamka diterapkan dalam penafsirannya, contohnya yaitu pada penafsirannya terhadap Q.S al-Ma'idah ayat 51. Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan yang sangat jelas untuk mengangkat pemimpin dari

kalangan Yahudi dan Nasrani. Penafsirannya tersebut dikaitkan dengan konteks sejarah, yaitu peristiwa pemilihan anggota Konstituante di Kota Bandung. Pada saat itu, perwakilan dari partai Islam berkeinginan untuk membentuk UUD yang terdiri dari tujuh kalimat termasuk kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut ditolak oleh beberapa kelompok, bahkan Protestan, Katholik, Partai Sosila, Partai Nasional dan Partai Komunis bersatu untuk menentang Islam meskipun mereka semua memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda (Hamka, 1982).

3. *Fusion of Horizons* (Peleburan Horizon)

Tahapan analisis yang selanjutnya adalah *fusion of horizons* atau peleburan horizon. Cara kerja dari *fusion of horizons* yang dikemukakan oleh Gadamer adalah meleburkan atau mendialogkan dua horizon yaitu horizon teks dan horizon pembaca (penafsir) yang mana pada setiap horizon memiliki realitas kesejarahan masing-masing. Kunci dari *fusion of horizons* yaitu horizon teks dan horizon pembaca (penafsir) berada pada masa dimana sejarah dan tradisi kebudayaan dibentuk pada masa yang berkelanjutan yaitu masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu adanya pendialogan horizon agar tercipta pemahaman yang baru (Rahmatullah, 2017).

Menurut Gadamer, pemahaman terhadap teks didasarkan pada bagaimana teks tersebut dipahami sesuai dengan konteks pada saat teks tersebut diturunkan dan juga bagaimana pemahaman mufassir terhadap

teks yang disesuaikan dengan zaman serta melibatkan realitas dan kondisi yang berbeda (Mu'tazza, 2022). Dalam hal ini menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait bagaimana pemahaman Sayyid Qutb dan Buya Hamka tentang kepemimpinan politik serta bagaimana penggabungan dua horizon sehingga menghasilkan pemahaman yang baru yang lebih komprehensif.

Peleburan horizon (*fusion of horizons*) yang terlihat dalam penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik diantaranya pada Q.S an-Nisa [04]: 58 Sayyid Qutb tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Akan tetapi, dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb menyebutkan ayat lain yang berkaitan dengan pembahasan ayat ini yaitu pada Q.S al-'Ankabuut [29]: 69 yang artinya *“Orang-orang yang berjihat untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”* Yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu berusaha untuk menunaikan amanat yang dipikul manusia sebagai makhluk Allah. Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb mengaitkan dengan kondisi sosial politik disekitar tempat tinggalnya. Pada saat itu banyak terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Sayyid Qutb menyebutkan bahwa menjaga amanah dan berbuat adil merupakan hak setiap orang dan wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Pada Q.S an-Nisa [04]: 59, Sayyid Qutb juga tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Dalam menafsirkan ayat yang berkaitan

dengan perintah taat kepada *ulil amri* ini Sayid Qutb mengaitkannya dengan beberapa hadits, diantaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan dari Ummul Hashiin bahwa Nabi saw bersabda: *“Seandainya seorang budak diangkat sebagai pemimpinmu untuk memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarkan dan taatilah dia.”* Kemudian Sayyid Qutb juga memberikan penjelasan siapakah *ulil amri* yang pantas untuk ditaati. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *ulil amri* yang pantas untuk ditaati yaitu *ulil amri* atau pemimpin yang berasal dari kalangan sendiri dan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan ajaran Allah serta senantiasa memerintahkan dalam hal yang ma’ruf. Penafsiran Sayyid Qutb pada ayat ini juga dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, terutama pada aspek politik. Hal ini dikarenakan pada saat itu banyak terjadi penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin.

Kemudian pada Q.S ali-Imran [03]: 159 Sayyid Qutb menyebutkan asbabun nuzul mikro dan juga asbabun nuzul makro. Asbabun nuzul mikro dari ayat ini yaitu sikap Rasulullah yang tetap bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang telah mendurhakainya ketika perang. Adapun asbabun nuzul makro dari ayat ini yaitu masyarakat Madinah pada saat itu seringkali melaksanakan musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Dalam penafsirannya ini, Sayyid Qutb menyebutkan kondisi masyarakat Madinah pada saat itu yaitu adanya suatu persoalan antara Rasulullah dengan kaumnya ketika hendak berangkat perang. Selain itu,

Sayyid Qutb juga menyebutkan bahwa masyarakat Madinah sudah terbiasa melakukan musyawarah dalam mencapai sebuah keputusan bersama. Penafsiran Sayyid Qutb pada ayat ini juga dikaitkan dengan kondisi sosial politik disekitar tempat tinggalnya yang pada saat itu banyak terjadi ketidakadilan. Sayyid Qutb menyebutkan bahwa untuk membentuk negara yang adil maka seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini yaitu memiliki sifat yang lemah lembut, pemaaf dan juga musyawarah.

Pada Q.S al-Ma'idah [05]: 51, Sayyid Qutb menyebutkan asbabun nuzul mikro dari ayat ini yaitu tentang perkataan Abdullah bin Ubay yang menyebutkan alasannya menjadikan Kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya yaitu *“sesungguhnya saya takut bencana-bencana, sedang saya tidak bisa lepas dari kekuasaan majikan-majikan saya.”* Selain itu, dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb juga menyebutkan kondisi masyarakat Madinah pada saat itu, yaitu masyarakat Madinah terdiri dari agama, suku dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Pada masa itu, masyarakat muslim Madinah juga masih menjalin perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak Nasrani. Penafsiran Sayyid Qutb pada ayat ini juga dikaitkan dengan kondisi politik semasa hidupnya yaitu masyarakat Islam sering berada dibawah jajahan non-muslim.

Kemudian pada Q.S asy-Syura [42]: 38, penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat ini tidak disertai dengan penyebutan asbabun nuzul dari ayat

ini. Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan kondisi masyarakat Madinah pada saat ayat ini diturunkan, yaitu masyarakat Madinah terdiri berbagai macam suku dan agama serta berasal dari latar kehidupan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu wadah yang dapat menghindarkan dari perpecahan. Kemudian Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan melakukan musyawarah agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak, meskipun itu merupakan seorang pemimpin. Selain itu, dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb juga mengaitkan dengan kondisi sosial politik semasa hidupnya dimana terjadi banyak ketidakadilan akibat dari keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemimpin yang berkuasa pada saat itu.

Pada Q.S Sad [38]: 26, Sayyid Qutb tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Sayyid Qutb juga tidak menyebutkan ayat lain ataupun hadist yang memiliki kaitan dengan pembahasan pada ayat ini. Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb mengaitkan dengan kondisi politik semasa hidupnya. Pada masa itu, kondisi politik di sekitar tempat tinggal Sayyid Qutb banyak terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa.

Kemudian pada Q.S al-Mu'minin [23]: 8, Sayyid Qutb juga tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Penafsiran pada ayat ini dikaitkan dengan kondisi sosial politik semasa hidup Sayyid Qutb yaitu maraknya kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa. Sayyid Qutb menyebutkan dalam ayat ini bahwa sistem kehidupan bersama tidak

akan berjalan dengan tegak lurus apabila amanah tidak ditunaikan dengan baik serta janji yang tidak dijaga.

Dan pada Q.S al-Ma'arij [70]: 32, Sayyid Qutb juga tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini sama seperti beberapa ayat sebelumnya yang berkaitan dengan kepemimpinan politik. Dalam menafsirkann ayat ini Sayyid Qutb menyebutkan ayat lain yang berkaitan dengan amanat, yaitu Q.S al-Ahzab [33]: 72 yaitu tentang amanah yang sebelumnya ditawarkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung tetapi mereka menolak amanat itu dan manusialah yang bersedia untuk mengemban amanah tersebut. Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb mengaitkan dengan realitas sosial politik yang terjadi pada saat itu, yaitu maraknya kasus ketidkadilan serta penindasan. Sayyid Qutb menghubungkan ayat ini dengan kasus-kasus yang dialami selama hidupnya yaitu megenai dirinya yang pernah menerima ketidakadilan dari penguasa, kasus penindasan serta kesengsaraan yang dialaminya.

Adapun peleburan horizon yang terlihat dari penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik yaitu pada Q.S an-Nisa [04]: 58 Hamka menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Selain itu, Buya Hamka juga menyebutkan aspek makro dari ayat ini yaitu dengan menyebutkan kisah yang terjadi mengiringi turunnya ayat ini. Dalam penafsiran Buya Hamka pada ayat ini terlihat bahwa latar belakang yang dimiliki oleh Buya Hamka berpengaruh pada hasil penafsirannya. Terlihat dalam penafsirannya ini Buya Hamka

menggunakan beberapa kosakata dari bahasa daerah tempat dimana beliau tinggal. Selain itu, Buya Hamka juga menyebutkan hadist yang memiliki kaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Dalam menafsirkan ayat ini Buya Hamka juga mengaitkan dengan kondisi politik Indonesia yang pada saat itu baru saja merdeka dari penjajahan. Buya Hamka menyebutkan bahwa untuk mencapai negara yang adil dan makmur maka setiap pihak baik itu rakyat ataupun pemimpin menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dengan baik.

Kemudian pada Q.S an-Nisa [04]: 59, Hamka tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Akan tetapi, dalam menafsirkan ayat ini Buya Hamka menyebutkan kisah tentang kepemimpinan pada masa *khalifah ar-rasyidin*. Selain itu, dalam penafsirannya Hamka juga menyebutkan beberapa pendapat dari ulama lain, salah satunya yaitu az-Zamakhsyari. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Kasysyaf*, Zamakhsyari menyebutkan bahwa *ulil amri minkum* adalah para pemimpin yang menegakkan kebenaran. Nuansa keindonesiaan terutama nuansa Minang terlihat dalam penafsiran Buya Hamka pada ayat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan memiliki pengaruh dalam hasil penafsiran Buya Hamka. Selain itu, Buya Hamka juga mengaitkan penafsirannya dengan kondisi politik Indonesia pada waktu itu baru merdeka dan sedang membentuk negara yang adil dan demokrasi.

Pada Q.S ali-Imran [03]: 159 Hamka tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini, akan tetapi Buya Hamka menyebutkan aspek makro

dari ayat ini. Dalam penafsirannya ini Buya Hamka menyebutkan kisah kepemimpinan pada masa setelah Nabi wafat. Dalam menafsirkan ayat ini Hamka juga mengaitkan dengan ayat lain, yaitu pada Q.S asy-Syura [42]: 38 yang menyebutkan bahwa musyawarah menjadi dasar dalam pembangunan masyarakat dan negara muslim. Dalam penafsiran Hamka pada ayat ini terlihat dengan sangat jelas bahwa latar belakang kehidupan Hamka berpengaruh pada penafsirannya. Terbukti pada perkataannya yaitu *“....satu Kepala yang memerintah dengan kehendak sendiri, dikelilingi oleh penjilat-penjilat yang hanya mengiya-iyakan apa yang beliau kehendaki.”* Dari perkataan tersebut menunjukkan bahwa Hamka pernah mengalami hidup dibawah kepemimpinan yang berjalan tidak sesuai dengan semestinya, yang mana pemimpin tersebut memimpin dengan semaunya sendiri. Selain itu, nuansa keindonesiaan juga terlihat dalam penafsiran Buya Hamka. Terlihat dari Buya Hamka menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Indonesia dan juga mengandung nuansa Minang.

Kemudian pada Q.S al-Ma'idah [05]: 51 Hamka menyebutkan asbabun nuzul ayat ini. Hamka menyebutkan kisah yang mengiringi turunnya ayat ini yang mengutip pendapat dari Ibnu Khaldun pada *muqaddimah* tarikhnya. Selain itu, Hamka juga menyebutkan fakta yang terjadi pada masa hidupnya yang berpengaruh pada hasil pemikirannya ini. Nuansa keindonesiaan sangat terasa dalam penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini. Dalam penafsirannya ini Buya Hamka menyebutkan

kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Pada Q.S asy-Syura [42]: 38 Hamka juga tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Dalam penafsiran Buya Hamka pada ayat ini dikaitkan dengan konteks sejarah pada masa Nabi saw dan kepemimpinan-kepemimpinan setelah Nabi, salah satunya yaitu mengenai penerapan musyawarah. Selain itu, penafsiran Buya Hamka pada ayat ini juga dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia. Buya Hamka menjadikan ayat ini sebagai landasan dalam membangun negara yang demokrasi.

Kemudian pada Q.S Sad [38]: 26 Hamka tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat. Dalam menafsirkan ayat ini Buya Hamka mengaitkan dengan kondisi politik zaman dahulu, terbukti dalam penafsirannya ini Buya Hamka menyebutkan kisah pemimpin pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Selain itu, dalam menafsirkan ayat ini Hamka juga mengutip pendapat dari ahli tafsir lainnya yaitu Fakhruddin ar-Razi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat al-Qur'an Buya Hamka tidak hanya menggunakan pemikirannya sendiri.

Pada Q.S al-Mu'minin [23]: 8 Hamka tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Hamka memulai penafsirannya dengan menyebutkan *munasabah* ayat ini dengan ayat yang sebelumnya yaitu setiap pribadi seseorang telah dibentuk dan diberi benteng sehingga ketika memasuki kehidupan rumah tangga dan masyarakat jiwanya telah bersih sehingga terhindar dari bahaya pencabulan dan pelacuran dan terbentuklah negara

yang adil dan makmur. Selain itu, dalam menafsirkan ayat ini Buya Hamka juga mengaitkannya dengan ayat lain, yaitu dengan Q.S al-Baqarah [02]: 148. Dalam menafsirkan ayat ini Buya Hamka juga mengaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Akan tetapi, meskipun latar belakang kehidupan yang dimiliki berbeda-beda, setiap individu memiliki kewajiban yang sama yaitu berkewajiban untuk menjaga amanah dan janji dengan baik.

Sedangkan pada Q.S al-Ma'arij [70]: 32 Hamka juga tidak menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Dalam menafsirkan ayat ini Buya Hamka tidak mengungkap sisi historis ayat. Buya Hamka mengaitkan ayat ini dengan hadist yang berkaitan dengan amanah. Selain itu, nuansa keindonesiaan dan Minang juga terlihat dalam penafsiran Buya Hamka pada ayat ini. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang yang dimiliki oleh seorang mufasir berpengaruh pada hasil penafsirannya.

Berikut ini tabel untuk membantu pemahaman analisis *fusion of horizons* pada pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka pada ayat-ayat tentang kepemimpinan politik:

Q.S	Sayyid Qutb	Buya Hamka
Q.S an-Nisa [04]: 58	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, menyebutkan munasabah ayat yang sudah	Menyebutkan asbabun nuzul, menyebutkan aspek historis dari ayat, serta mengaitkan dengan kondisi

	dimodifikasi sendiri, menyebutkan sisi historis dari ayat dan disesuaikan dengan kondisi pada masa Sayyid Qutb.	politik negara Indonesia yang baru saja mengalami kemerdekaan.
Q.S an-Nisa [04]: 59	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, mengaitkan ayat dengan hadits, menyebutkan sisi historis dari ayat dan disesuaikan dengan konteks sosial politik pada masa Sayyid Qutb.	Tidak menyebutkan asbabun nuzul ayat, menyebutkan kisah tentang kepemimpinan pada masa khalifah, mengaitkan dengan kondisi politik Indonesia.
Q.S ali-Imran [03]: 159	Menyebutkan asbabun nuzul ayat, mengaitkan dengan kondisi masyarakat Madinah pada saat ayat ini diturunkan dan juga mengaitkan dengan kondisi sosial politik pada masa Sayyid Qutb.	Tidak menyebutkan asbabun nuzul tetapi menyebutkan aspek makro dari ayat, menyebutkan kisah kepemimpinan setelah Nabi wafat, mengaitkan dengan ayat lain, serta mengaitkan dengan kondisi politik Indonesia.
Q.S al-	Menyebutkan asababun	Menyebutkan asbabun

Ma'idah [05]: 51	nuzul, menyebutkan kondisi masyarakat Madinah pada saat ayat ini diturunkan, serta menyebutkan sisi historis ayat dan mengaitkan dengan konteks sosial politik pada masa Sayyid Qutb.	nuzul, menyebutkan kisah yang terjadi mengiringi turunnya ayat, mengaitkan dengan kondisi kepemimpinan pada masa itu.
Q.S asy-Syura [42]: 38	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, mengungkap kondisi masyarakat Madinah pada saat ayat diturunkan, serta mengaitkan dengan konteks sosial politik pada masa Sayyid Qutb.	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, menyebutkan kisah kepemimpinan pada masa Nabi dan setelah Nabi, mengaitkan dengan kondisi politik Indonesia.
Q.S Sad [38]: 26	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, mengaitkan dengan kondisi sosial politik pada masa Sayyid Qutb.	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, menyebutkan kisah kepemimpinan pada zaman dahulu yaitu kepemimpinan pada masa Dinasti Umayyah, mengutip pendapat dari ahli tafsir lain

		yaitu pendapat dari Fakhruddin ar-Razi.
Q.S al-Mu'minun [23]: 8	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, mengaitkan dengan kondisi politik pada masa Sayyid Qutb.	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, menyebutkan munasabah dengan ayat sebelumnya, mengaitkan dengan ayat lain, mengaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.
Q.S al-Ma'arij [70]: 32	Tidak menyebutkan asbabun nuzul, menyebutkan munasabah ayat yang sudah dimodifikasi sendiri, serta mengaitkan dengan kondisi politik yang terjadi pada masa Sayyid Qutb.	Tidak menyebutkan asbabun nuzul dan tidak mengungkap sisi historis ayat, mengaitkan dengan hadits tentang amanah.

4. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka tentang Kepemimpinan Politik Menggunakan Analisis Hermeneutika Gadamer

a. Teori Prasangka (Pra-Pemahaman)

Konsep prasangka atau pra-pemahaman terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik yang dimiliki oleh Sayyid Qutb dan Buya Hamka tidak jauh berbeda. Pemahaman awal Sayyid Qutb dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat tersebut yaitu mengenai sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat-sifat tersebut diantaranya adil, menjaga amanah, menjalankan musyawarah sebagai jalan untuk memperoleh kesepakatan bersama terutama dalam hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Adapun perbedaannya terletak pada kecondongan pemikiran yang dimiliki oleh Sayyid Qutb dan Buya Hamka. Pemikiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik ini lebih condong ditujukan untuk memberikan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan yang pada masa itu dilakukan oleh pihak pemimpin yang berkuasa. Sedangkan pemikiran dari Buya Hamka lebih condong pada perjuangan umat Islam Indonesia yang pada saat itu baru saja mengalami kemerdekaan untuk menjaga identitas keislaman mereka.

b. Teori Pengaruh Sejarah

Latar belakang sejarah yang dimiliki oleh Sayyid Qutb dan Buya Hamka menimbulkan paradigma pemikiran yang tidak seutuhnya sama. Meskipun Sayyid Qutb dan Buya Hamka memiliki

latar belakang kehidupan yang hampir sama, akan tetapi pemikirannya memiliki tujuan yang berbeda. Pemikiran Sayyid Qutb pada ayat-ayat tentang kepemimpinan ini bertujuan untuk melawan sekularisme (pemisahan antara agama dan negara) yang pada saat itu berkembang di Mesir. Sayyid Qutb berpandangan bahwa agama Islam merupakan agama yang paling benar sehingga sistem kepemimpinan yang dijalankan dikembalikan kepada syariat Islam. Melalui ayat-ayat tentang kepemimpinan politik ini, Sayyid Qutb menyebutkan setidaknya ada beberapa asas yang harus diterapkan dalam kepemimpinan politik. Asas-asas tersebut diantaranya penegakkan keadilan, ketaatan rakyat kepada pemimpin, dan musyawarah antara pemimpin dan rakyat untuk mencapai keputusan bersama. Selain itu, Sayyid Qutb juga menyebutkan larangan mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani (non-Islam) atau yang tidak sepaham dengan Islam. Hal ini dikarenakan jika non-Islam menjadi seorang pemimpin maka mereka tidak akan memimpin berdasarkan nilai-nilai keislaman serta mereka tidak akan memberikan perlindungan kepada masyarakat Islam. Mereka hanya akan memberikan perlindungan kepada golongan mereka atau kepada mereka yang memiliki pemahaman yang sama.

Adapun pemikiran Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik lebih menekankan pada menjaga identitas keislaman. Pemikiran Hamka menekankan pada penekanan prinsip-

prinsip Islam dalam pelaksanaan tata kelola negara. Pada pemikirannya ini, Buya Hamka menekankan asas keadilan, amanah dan demokrasi. Pemikiran Buya Hamka menyebutkan bahwa dalam tata kelola negara sangat penting untuk memadukan antara agama dan negara. Hal ini dikarenakan hubungan yang harmonis antara agama dan negara akan membawa keadilan bagi rakyat. Pemikiran Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang menjunjung tinggi paham demokrasi dan keberagaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam maka akan terwujud kehidupan yang adil dan sejahtera. Inti dari pemikiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat tentang kepemimpinan yaitu perjuangan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

c. Teori *Fusion of Horizons* (Peleburan Horizon)

Berikut ini perbandingan analisis *fusion of horizons* pada penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik. Pemikiran Sayyid Qutb pada ayat-ayat tentang kepemimpinan politik ini lebih menekankan pada kondisi sosial politik pada masa kontemporer dan juga seringkali mengaitkan dengan peristiwa politik yang sedang terjadi. Sedangkan pemikiran Buya Hamka lebih beragam yaitu mencakup aspek historis, kontemporer serta aspek teologis. Pemikiran Buya Hamka juga seringkali dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia terutama pada masa awal-awal

kemerdekaan. Pemikiran Sayyid Qutb lebih cenderung memberikan penafsiran yang bersifat revolusioner. Sayyid Qutb menggunakan al-Qur'an sebagai media untuk melakukan perubahan sosial, yaitu dari kepemimpinan yang menganut paham sekularisme (memisahkan antara agama dan negara) menjadi kepemimpinan yang didasarkan pada al-Qur'an. Latar belakang kehidupan Sayyid qutb yang mengalami penjajahan dan ketidakadilan dari penguasa menjadikan pemikirannya bersifat reaktif terhadap situasi yang dialaminya. Berbeda dengan Sayyid qutb yang melihat ayat-ayat tersebut lebih condong pada aspek politik, Buya Hamka memandang ayat-ayat tentang kepemimpinan politik ini dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Tidak hanya memandang dari aspek politik, Buya Hamka juga memandang dari aspek sosial, teologi dan sejarah. Penafsiran Buya Hamka juga lebih bersifat konstruktif dan membangun tatanan dalam masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil dan makmur. Hal ini dikarenakan Buya Hamka hidup pada masa awal kemerdekaan, sehingga pada masa itu belum terbentuk tatanan yang baik dalam menjalankan sebuah kepemimpinan bernegara.

5. Kecenderungan Pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka Mengenai Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Politik

Setelah melakukan analisis terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan politik, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa menurut Sayyid Qutb seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk

menegakkan hukum Allah. Yang dimaksud menegakkan hukum Allah disini yaitu menjalankan kepemimpinan dengan sebaik mungkin dengan tidak hanya mementingkan diri pemimpin itu sendiri. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya menjabat sebagai pemegang kekuasaan penuh, memiliki kendali penuh atas negara dan seisinya. Akan tetapi menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt dan rakyatnya. Penegakkan hukum Allah juga tidak hanya sekedar menjalankan syariat-syariat Allah yang telah diajarkan, melainkan juga berkewajiban untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan dan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh masyarakat. Pada sejatinya, menjadi seorang pemimpin merupakan menjadi seorang pelayan bagi rakyatnya yang selalu siap sedia membantu masyarakatnya.

Sayyid Qutb berpendapat bahwa hal utama yang harus ada dalam kepemimpinan terutama kepemimpinan politik adalah keadilan dan musyawarah (demokrasi). Menurut Sayyid Qutb, sebuah negara harus membentuk sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang dimilikinya. Keadilan menjadi prinsip dasar yang harus ditegakkan oleh setiap pemimpin dalam penentuan setiap kebijakan dan tindakan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memastikan bahwa semua rakyatnya mendapatkan keadilan.

Tidak ada yang meniadakan diskriminasi baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Selain keadilan, Sayyid Qutb juga menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam kepemimpinan. Dalam agama Islam, sistem demokrasi diwujudkan dengan musyawarah yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan kemaslahatan bersama. Musyawarah bukanlah sebatas formalitas melainkan sebuah dialog yang mendalam antara pemimpin dengan masyarakat untuk mencari sebuah kesepakatan bersama terutama yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Proses berjalannya musyawarah harus benar-benar mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat baru kemudian diambil keputusan terbaik dari hasil musyawarah tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun pemikiran Buya Hamka pada konteks kepemimpinan politik juga lebih menekankan pada aspek keadilan dan demokrasi. Buya Hamka menyebutkan bahwa salah satu prinsip utama agar tercipta kepemimpinan yang baik adalah keadilan. Seorang pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu, karena semua rakyat siapa pun itu baik miskin ataupun kaya, baik penguasa maupun rakyat biasa berhak untuk mendapatkan keadilan yang setara. Pengambilan keputusan dalam penegakkan hukum harus didasari dengan pertimbangan yang matang dan adil, serta harus mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Selain keadilan dalam konteks penegakkan hukum, Hamka juga berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan dalam aspek

pembagian sumber daya, kesempatan, serta mendapatkan pelayanan publik yang sama. Seorang pemimpin yang adil senantiasa berusaha untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang setara sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan.

Selain keadilan, Buya Hamka juga menekankan prinsip demokrasi, yaitu dengan mengadakan musyawarah dalam menetapkan keputusan bersama. Pemimpin harus melibatkan tokoh masyarakat dan para ahli dalam menjalankan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi di kalangan masyarakat. Musyawarah harus dijalankan dengan sebaik mungkin dengan mendengarkan dan mempertimbangkan setiap suara yang diajukan oleh setiap warga negara bukan hanya sebatas formalitas saja. Jika di negara tersebut terdapat lembaga perwakilan rakyat, maka lembaga tersebut harus berperan aktif sebagai penyalur aspirasi-aspirasi yang diajukan oleh masyarakat serta berperan untuk mengawasi berjalannya kepemimpinan pemerintahan. Selain pemimpin yang harus menjalankan musyawarah dengan baik, masyarakat juga harus berperan aktif dalam proses berjalannya pengambilan keputusan, baik itu melalui musyawarah, pemilihan umum, maupun prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang lainnya.

Berdasarkan analisis diatas diketahui bahwa Sayyid Qutb dan Buya Hamka lebih menekankan pada aspek keadilan dan demokrasi dalam menciptakan kepemimpinan politik yang baik sesuai dengan kandungan al-Qur'an. Dengan mengedepankan kedua aspek tersebut berusaha untuk

menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dengan menjadikan masyarakat sebagai prioritas. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebagai ajang untuk memperkaya diri, tetapi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat atas amanah besar yang diberikan kepadanya yang diwujudkan dengan kepemimpinan yang adil dan demokratis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian temuan dalam analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berusaha untuk menarik kesimpulan terkait penelitian tentang kepemimpinan politik perspektif penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka ke dalam dua point:

1. Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik menyebutkan bahwa kepemimpinan politik yang baik adalah kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Sayyid Qutb dan Buya Hamka menyebutkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berusaha untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah dengan baik, menjalankan musyawarah sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan bersama terutama dalam urusan kenegaraan. Selain pemimpin yang harus menegakkan asas-asas tersebut, rakyat juga memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang berkuasa selama pemimpin tersebut menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam.
2. Berdasarkan analisis perbandingan pada penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terkait ayat-ayat tentang kepemimpinan politik dengan menggunakan teori hermeneutika Gadamer menunjukkan bahwa antara pemikiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan. Sayyid Qutb dan Buya Hamka sependapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, amanah, dan harus

menjunjung tinggi musyawarah dalam menentukan kesepakatan bersama. Perbedaan penafsiran Sayyid Qutb dan Buya Hamka terlihat dari latar belakang sejarah yang melingkupinya. Penafsiran Sayyid Qutb lebih fokus pada perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sehingga penafsirannya lebih bersifat revolusioner dan kontekstual sesuai dengan situasi politik Mesir pada saat itu. Sedangkan penafsiran Buya Hamka lebih menekankan pada pentingnya menjaga identitas keislaman pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sehingga penafsiran Buya Hamka lebih bersifat konstruktif dan berusaha membangun tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jika dilihat dari aspek *fusion of horizons*, penafsiran Sayyid Qutb lebih condong pada aspek politik dan dikaitkan dengan kondisi politik masa kontemporer. Sedangkan penafsiran Buya Hamka menggunakan pendekatan yang lebih luas. Penafsiran Buya Hamka tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga mencakup aspek sosial, sejarah, dan teologi. Meskipun terdapat perbedaan dari segi latar belakang sejarah dan sosial, tetapi pemikiran dari Sayyid Qutb dan Buya Hamka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penulisan penelitian komparatif ini, penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya terkait

dengan tafsir al-Qur'an terutama mengenai kepemimpinan politik. Selain itu, penulis juga berharap kepada para peneliti yang selanjutnya agar lebih dalam lagi dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik dan tentunya dengan menggunakan rujukan-rujukan yang akurat dan terpercaya.



DAFTAR PUSTAKA

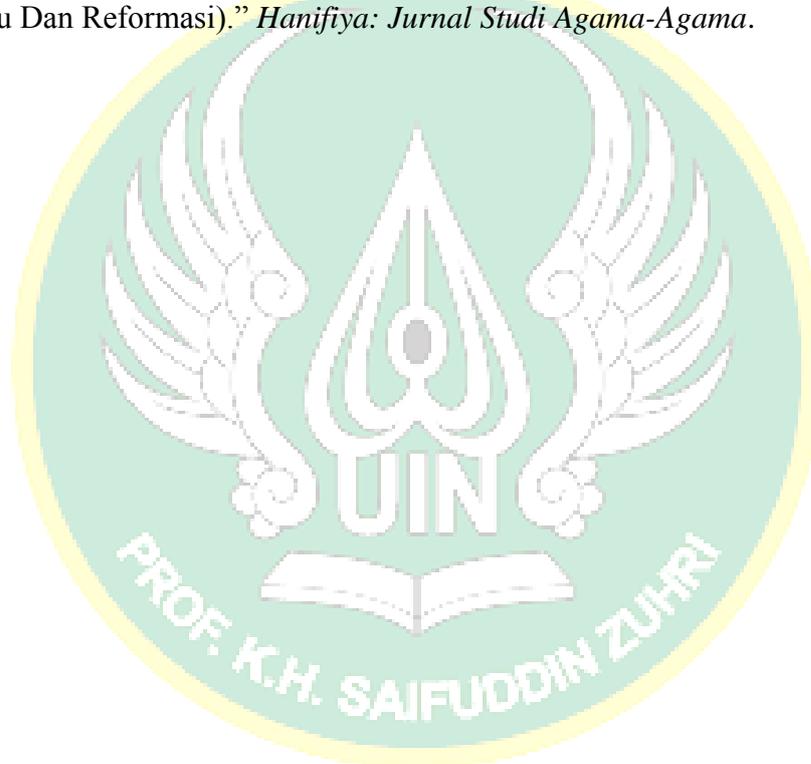
- ABD. RASYID, A. .. 2022. "Prinsip Pemerintahan Islam Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fī Zhilālil Qur'Ān (Kajian Surah an-Naml [27]: 32-33, Asy-Syūra [26]: 38, Al-Māidah [5]: 8, an-Nisā' [4]: 1)." *Jurusan Ilmu Al-Qur'Ān Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Mataram* 5–24.
- Afrizal, Nur. 2021. *Memahami Orientasi Dan Corak Penafsiran Buya Hamka*. 1st ed. Sleman, Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Al-Fathoni, Ibnu Ahmad. 2015. *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu (Buya Hamka)*. Cetakan Pe.
- Alam, Chaidir. 2020. "Penafsiran SAyyid Qutb Tentang Ayat-Ayat Makr." *Nature Microbiology* 3(1):641.
- Alviyah, Avif. 2017. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15(1):25. doi: 10.18592/jiiu.v15i1.1063.
- Asmita, Ayu. 2022. *Karakter Thagut Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.
- Fattah, Mohammad, and Ana Maftuhatul Khasanah. 2021. "Pakaian Ideal Seorang Muslimah (Studi Komparatif Dalam Pentafsiran Al-A' Raf Ayat 26 Antara Kitab Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)." *Penerbit UTHM* 2(1):21–32.
- Fazira, Gilang. 2023. "Kepemimpinan Politik Menurut Raja Ali Haji."
- Firdaus, Muhamad Yoga, and Eni Zulaiha. 2023. "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5(6):2717–30. doi: 10.47467/reslaj.v5i6.2553.
- Halimatussa'diyah, Abdul Kher, Rahmat Hidayat, and Sulaiman Mohammad Nur. 2024. "Tafsir Politik: Studi Terhadap Pemikiran Politik Hamka Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4.
- Hamka, Prof. Dr. Buya. 1982. "Tafsir Al-Azhar Jilid 8." in 8. *Pustaka Nasional PTE LTP Singapura*.
- Hamka. n.d. "Tafsir Al-Azhar." in *Jilid 2*. *Pustaka Nasional PTE LTP Singapura*.
- Hamka, Buya. 1982. "Tafsir Al-Azhar Jilid 3." in 3. *Pustaka Nasional PTE LTP Singapura*.
- Hamka, Prof. Dr. n.d. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. *Pustaka Nasional PTE LTP Singapura*.
- Hamka, Prof Dr. Buya. 1982a. "Tafsir Al-Azhar Jilid 10." in 10. *Pustaka Nasional*

PTE LTP Singapura.

- Hamka, Prof Dr. Buya. 1982b. "Tafsir Al-Azhar Jilid 6." in 6. Pustaka Nasional PTE LTP Singapura.
- Hamka, Prof Dr. Buya. 1982c. "Tafsir Al-Azhar Jilid 9." in 9. Pustaka Nasional PTE LTP Singapura.
- Hanif, Muh. 2017. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-q Ur'an." *Maghza* 2(40).
- Hidayati, Husnul. 2018. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-'Umdah* 1(1):25–42. doi: 10.20414/el-umda.v1i1.407.
- Humaira, Dara, and Puji Astuti. 2017. "Kritik Sosial-Politik Dalam Qs. Yusuf Ayat 54-57 (Telaah Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2(2):81–90. doi: 10.24090/maghza.v2i2.1571.
- Khotimah, Khosnol, and Muwahid. n.d. "KEBERADAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI BENTUK PELEMBAGAAN DEMOKRASI." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2:1–17.
- Kurniawan, Agwin Albert. 2017. *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kisah Nabi Hud Menurut Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.
- Kustiawan, Winda, Tifani Liusnimun, Nurul Hidayat, and Jaman Wahidin. 2022. "Komunikator Utama Dalam Politik, Komunikator Politik Dan Kepemimpinan Politik." *Komunikasi Islam* 3(1):13–22.
- Lestari, Mutia, and Susanti Vera. 2021. "Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Qutb." 1(1):47–54.
- Mu'tazza, Ma'bad Fathi. 2022. "KONSEP TABATTUL MENURUT AZ-ZAMAKHSHARI DALAM TAFSIR AL-KASYSYAF DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR (Analisis Hermeneutika Gadamer)."
- Mudin, Moh Isom, Muhammad Dhiaul Fikri, and Munar Moh Shobirin. 2021. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan." 27(2):113–26.
- Muhajirin. 2017. "Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya, Dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam Al-Quran)." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan* 18(1):101–23.
- Muhlis, Moh, and Moh. Jufriyadi Sholeh. 2019. "Hakikat Gunung Berjalan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Penafsiran Surah an-Naml Ayat: 88 Dalam Kitab Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi Dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)." *EL-WAROQOH: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 3(1):1–25.

- Nandya Indayanti, Aneu. n.d. "IMPLEMENTASI SUMBER, PENDEKATAN, CORAK DAN KAIDAH TAFSIR KARYA SAYYID QUTHB DALAM KITAB TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN JILID 3." *Al-Tadabbur : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (c):291–304. doi: 10.30868/at.v7i0.
- Qoharuddin, Moch Azis. 2019. "Konsep Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Kepemimpinan Politik Dalam Islam." 5.
- Qutb, Sayyid. 2001a. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)." in 12. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qutb, Sayyid. 2001b. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)." in 10.
- Qutb, Sayyid. 2001c. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2." in 2. Gema Insani.
- Qutb, Sayyid. 2002. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 3." in 3, edited by T. G. dan Ha. Kurniawan. Gema Insani.
- Qutb, Sayyid. 2004. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an." in 8. Gema Insani.
- Qutb, Sayyid. 2001. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1." in 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, Sayyid. 2001. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an." in *Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Quthb, Sayyid. 2004. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an." in 10, edited by T. GIP. Gema Insani.
- Rahman, Habibur. 2022. *Buku Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*.
- Rahmatullah. 2017. "Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H. G. Gadamer Dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran." *Nun* 3:149–68.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. 2017. "ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN KARYA SAYYID QUTB." *Ittihad* I(2):255–61.
- Subangga, Bymmas. 2022. "Teologi Moderat Asy'ariyah Dalam Karya Mohammad Yunus Masrukhin: Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer."
- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, and M. Nurwathani Janhari. 2021. "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3(1):66–86. doi: 10.20414/sophist.v3i1.39.
- Wahyuni, Putri Siti. 2022. *E-Book Ilmu Politik (Pemikiran & Konsep Politik Islam Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an)*.

- Winata, Alfred Hadi. 2021. "Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb."
- Wulandari, Wulandari, Usep Dedi Rostandi, and Engkos Kosasih. 2017. "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat Ishlāh (Studi Tafsir Fī Zhilāl Alquran)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 2(1):78–83. doi: 10.15575/al-bayan.v2i1.1811.
- Zaedi, Mohammad. 2021. "Karakteristik Tafsir Fī Zhilalil Quran." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1(1):23–40.
- Zubaidah, Syarif. n.d. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Politik Umat Islam." *Jurnal Hukum Islam Al Mawarid* 8.
- Zulaiha, Eni, Kartini Fujiyanti Agustin, and Nida Al Rahman. 2022. "Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran Di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Soimatur Rohmah
2. NIM : 2017501032
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 01 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Gandu, Rt 03, Rw 04
Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kab.
Kebumen
5. Nama Ayah : Wasimin
6. Nama Ibu : Saodah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MIN Tanjungsari, lulus 2014
 - b. MTsN Klirong, lulus 2017
 - c. MA Sunan Pandanaran, lulus 2020
 - d. S-1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, masuk 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta
 - b. Pondok Pesantren Al-Amin Grendeng, Purwokerto Utara

Purwokerto, 18 Desember 2024

(Soimatur Rohmah)